

Elmon Tampubolon, S.Pd., M.M

Suria Alamsyah Putra, SE., M.M

Hendrik Pantas, S.Sos., M.Sc



EKONOMI POLITIK

(DALAM PRESPEKTIF MANAJEMEN)

Editor : Santoso, SE., M.M & Elly Rahayu, SE., M.M

EKONOMI POLITIK

(Dalam Perspektif Manajemen)

ELMON TAMPUBOLON, S.PD., M.M
SURIA ALAMSYAH PUTRA, SE., MM
HENDRIK PANTAS, S.SOS, M.SC



pena persada
PENERBIT CV. PENA PERSADA

EKONOMI POLITIK

(Dalam Perspektif Manajemen)

Penulis:

Elmon Tampubolon, S.Pd., M.M
Suria Alamsyah Putra, SE., MM
Hendrik Pantas, S.Sos, M.Sc

ISBN: 978-623-455-121-1

Editor:

Santoso, SE., M.M., Elly Rahayu, SE., M.M.

Design Cover:

Retnani Nur Brilliant

Layout:

Nofendy Ardyanto

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sebab berkat karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan buku Ekonomi Politik (Dalam Perspektif Manajemen) ini yang masih merupakan suatu kajian dasar yang nantinya masih perlu dikembangkan lagi pembahasannya.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penulisan buku ini. Semoga kerja sama yang baik ini akan terus terjalin dalam penulisan buku selanjutnya bukan hanya dalam penulisan buku Ekonomi Politik (Dalam Perspektif Manajemen) ini.

Ilmu ekonomi politik merupakan bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu yaitu politik dan ekonomi. Ilmu ekonomi politik ini memang adalah pembelajaran ilmu yang memiliki sifat interdisiplin dimana ini terbagi menjadi dua disiplin ilmu dan digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik.

Ilmu ini mengkaji dua jenis ilmu yaitu ilmu politik dan ilmu ekonomi yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik. Fokus dari studi ekonomi politik ini adalah fenomena-fenomena ekonomi yang secara umum terus bergulir lalu dikaji kembali agar bisa lebih spesifik. Tetapi karena seiring perkembangan istilah ini selalu mengacu kepada adanya interaksi dari kedua aspek baik itu ekonomi maupun politik.

Mahasiswa serta akademisi dan masyarakat yang ingin atau sedang belajar Ekonomi Politik, buku ini sangat cocok sebagai bahan referensi dan rujukan.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik dapat ditujukan kepada penulis, sehingga di masa depan buku ini dapat ditingkatkan untuk disempurnakan.

Medan, April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik.....	1
1. Ilmu Ekonomi.....	1
2. Ilmu Politik.....	5
B. Lahirnya Ilmu Ekonomi.....	8
C. Mazhab dalam Ilmu Ekonomi.....	13
BAB 2 MENGENAL EKONOMI POLITIK.....	18
A. Definisi Ekonomi Politik.....	18
B. Sejarah Ekonomi Politik.....	20
C. Prinsip Ekonomi Politik.....	23
D. Pembagian Ekonomi Politik.....	25
E. Tujuan Ekonomi Politik.....	27
BAB 3 KAITAN EKONOMI DENGAN POLITIK.....	28
A. Pentingnya memahami Ekonomi Politik.....	28
B. Keterkaitan antara Ekonomi dan Politik.....	30
BAB 4 IDEOLOGI UTAMA DALAM EKONOMI POLITIK	
GLOBAL ANTARA MERKANTILISME	
DAN LIBERALISM.....	35
A. Merkantilisme dan alasannya.....	35
B. Kekuatan dan Kelemahan Merkantilisme.....	38
C. Liberalisme dan Alasannya.....	42
D. Kekuatan dan Kelemahan.....	46
BAB 5 KAITAN EKONOMI POLITIK	
DENGAN MANAJEMEN.....	48
A. Pengertian Manajemen.....	48
B. Ekonomi Politik dan Manajemen.....	49
C. Peran Negara dalam dalam Ekonomi Politik.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
TENTANG PENULIS.....	56

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik

1. Ilmu Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (*scarcity*).

Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani *oikos* (*oikos*) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos* (*nomos*), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

Berikut ini akan disebutkan beberapa definisi tentang ilmu ekonomi. Pandangan dari Albert L. Meyers ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Kata kunci dari definisi ini merupakan; *pertama*, tentang “kebutuhan” : ialah suatu keperluan manusia terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang sifat dan jenisnya sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. *Kedua*, “tentang pemenuhan kebutuhan” yang memiliki ciri-ciri “terbatas” adanya. Aspek yang kedua inilah menurut Lipsey (1981:5) yang menimbulkan masalah dalam ekonomi, ialah karena adanya suatu kenyataan yang senjang, karena kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa jumlahnya tak terbatas, sedangkan di lain pihak barang-barang dan jasa-jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan sifatnya langka ataupun terbatas. Itulah

sebabnya manusia di dalam hidupnya senantiasa berhadapan dengan kekecewaan maupun ketidakpastian.

Definisi ini nampaknya begitu luas sehingga kita sulit memahami secara spesifik. Ahli ekonomi lainnya ialah J.L. Meij (Abdullah, 1992:6) mengemukakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang usaha manusia ke arah kepuasan akan kebututhan hidup. Pendapat tersebut sangat realistis, karena dilihat dari sudut pandang dari aspek ekonomi di mana manusia sebagai makhluk ekonomi (*Homo Economicus*) pada hakekatnya mengarah kepada pencapaian kepuasan akan kebututhan hidup. Kepuasan akan kebututhan hidup menjadi tujuan sentral dalam kehidupan manusia secara ekonomi, sesuai yang dituliskan pelopor "liberalisme ekonomi" oleh Adam Smith dalam buku "*An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*" tahun 1776. Tetapi dengan cara bagaimana manusia itu berusaha mencapai kepuasan akan kebututhan hidupnya?

Kemudian Samuelson dan Nordhaus (1990:5) mengemukakan "Ilmu ekonomi merupakan studi tentang ragam kebutuhan orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya".

Jika disimpulkan dari tiga pendapat di atas walaupun kalimatnya berbeda, tetapi tersirat bahwa pada hakikatnya ilmu ekonomi itu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kepuasan akan kebututhan hidup yang diharapkan, dengan memilih penggunaan sumber daya produksi yang sifatnya langka/terbatas itu.

Dengan kata lain yang sederhana bahwa ilmu ekonomi itu merupakan suatu disiplin tentang aspek-aspek ekonomi dan tingkah laku manusia. Secara fundamental dan historis, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yakni

ilmu ekonomi positif dan normatif (Samuelson dan Nordhaus, 1990:9). Jika ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi normatif membahas pertimbangan-pertimbangan nilai dan etika, seperti haruskan sistem perpajakan diarahkan pada kaidah mengambil dari yang kaya untuk menolong yang miskin?

Lebih jelasnya Sastradipoera, (2001:4), mengemukakan. "Ilmu ekonomi positif merupakan ilmu yang hanya melibatkan diri dalam masalah 'apakah yang terjadi'". Oleh karena itu ilmu ekonomi positif itu netral terhadap nilai-nilai. Berarti ilmu ekonomi positif itu 'bebas nilai' (*value free* atau *wetfrei*)... hanya menjelaskan 'apakah harga itu' dan 'apakah yang akan terjadi jika harga itu naik atau turun' bukan 'apakah harga itu adil atau tidak'...*Ilmu ekonomi normative*, bertentangan dengan ilmu positif, ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah 'apakah yang seharusnya terjadi'.

Esensi dasar ilmu ekonomi merupakan pertimbangan nilai (*value judgment*). Seorang ekonom penganut etika puritan egalitarianisme, Gunnar Myrdal (1898-1987) lebih suka menyebutnya 'ilmu ekonomi institusional'. Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial, tentu berkaitan dengan bidang-bidang disiplin akademis lainnya, seperti ilmu politik, psikologi, antropologi, sosiologi, sejarah, geografi, dan sebagainya. Sebagai misal kegiatan-kegiatan politik seringkali dipenuhi dengan masalah-masalah ekonomi, seperti kebijaksanaan proteksi terhadap industri kecil, undang-undang perpajakan, dan sanksi-sanksi ekonomi. Ini berarti bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan-kegiatan politik (*Abdulah, 1992: 6*).

Sebagai disiplin yang mengkaji tentang aspek ekonomi dan tingkah laku manusia, berarti begitu pula mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam

masyarakat. Dan perlu diketahui, bahwa mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi, tujuannya merupakan berusaha untuk mengerti hakikat dari peristiwa-peristiwa tersebut yang selanjutnya untuk dipahaminya.

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa tujuan ilmu ekonomi itu untuk: (1) mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, baik yang berupa hubungan kausal maupun fungsional. (2) untuk dapat menguasai masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat (Abdullah, 1992:7). Ilmu ekonomi begitu pula memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Walaupun kita ketahui dalam ilmu ini telah digunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif-matematis, tetapi pendekatan-pendekatan tersebut tidak dapat menghilangkan keterbatasan-keterbatasannya yang melekat pada ilmu ekonomi sebagai salah satu cabang ilmu sosial.

Menurut Abdullah, (1992:8), keterbatasan-keterbatasan tersebut mencakup: (1) Objek penyelidikan ilmu ekonomi tidak dapat dilokalisasikan. Sebagai akibatnya kesimpulan atau generalisasi yang diambilnya bersifat kontekstual (akan terikat oleh ruang dan waktu). (2) Dalam ilmu ekonomi manusia selain berkedudukan sebagai subjek yang menyelidiki, begitu pula objek yang diselidiki. Oleh karena itu hasil penyelidikannya yang berupa kesimpulan ataupun generalisasi, tidak dapat bersifat mutlak, di mana unsur-unsur subjeknya akan mewarnai kesimpulan tersebut. (3) Tidak ada laboratorium untuk mengadakan percobaan-percobaan. Sebagai akibatnya ramalan-ramalan ekonomi sering kurang tepat. (4) Ekonomi hanya merupakan salah satu bagian saja dari seluruh program aktivitas di suatu negara. Oleh karena itu apa yang direncanakan (*ex ante*) dan kenyataannya (*ex-post*) sering tidak sejalan.

2. Ilmu Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

- a. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
- b. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- c. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
- d. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara, yang paling terkenal adalah mikroekonomi versus makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) versus normatif, mainstream versus heterodox, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan,

keluarga dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi seperti yang telah disebutkan di atas adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia.

Ada sebuah peningkatan tren untuk mengaplikasikan ide dan metode ekonomi dalam konteks yang lebih luas. Fokus analisa ekonomi adalah “pembuatan keputusan” dalam berbagai bidang dimana orang dihadapi pada pilihan-pilihan. misalnya bidang pendidikan, pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal, perang, dan agama. Gary Becker dari University of Chicago adalah seorang perintis tren ini. Dalam artikel-artikelnya ia menerangkan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditegaskan melalui pokok persoalannya, tetapi sebaiknya ditegaskan sebagai pendekatan untuk menerangkan perilaku manusia. Pendapatnya ini terkadang digambarkan sebagai ekonomi imperialis oleh beberapa kritikus.

Banyak ahli ekonomi mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang ada sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya; walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan “apa seharusnya dilakukan para ahli ekonomi?” *The traditional Chicago School, with its emphasis on economics being an empirical science aimed at explaining real-world phenomena, has insisted on the powerfulness of price theory as the tool of analysis. On the other hand, some economic theorists have formed the view that a consistent economic theory may be useful even if at present no real world economy bears out its prediction.*

Menurut Aristoteles, selama manusia menjadi makhluk sosial (*zoon politikon*), selama itu pula ditemukan politik. Ini berarti dalam kehidupan bersama, manusia memiliki hubungan yang khusus yang diwarnai oleh adanya aturan yang mengatur. Ada kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh segelintir orang yang

sekaligus melahirkan aturan serta aturan mana yang perlu dipelihara dan tidak, kemudian menentukan apakah seseorang mengikuti aturan atau tidak, serta menentukan sanksi serta ganjaran bagi yang mengikuti dan melanggar aturan tersebut. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu "*polis*" yang berarti kota. Orang yang mendiami *polis* disebut "*polites*" atau warga negara, sementara kata "*politikos*" berarti kewarganegaraan. Lalu muncul istilah "*politike techne*" yang berarti kemahiran politik. "*Ars politica*" yang berarti kemahiran tentang soal kenegaraan. "*Politike epitesme*" berarti ilmu politik, istilah yang saat ini banyak digunakan.

Politik memiliki banyak definisi tergantung sudut pandang si pembuat definisi. Miriam Budiardjo (1993) mendefinisikan politik sebagai berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Sementara itu, Hoogerwerf, mendefinisikan politik sebagai pertarungan kekuasaan. Hans Morgenthau juga mendefinisikan politik sebagai usaha mencari kekuasaan (*struggle power*). Sementara David Easton mengartikan politik sebagai semua aktivitas yang mempengaruhi kebijaksanaan dan cara bagaimana kebijaksanaan itu dilaksanakan.

Dengan demikian, mengikuti Budiardjo (1993), sesungguhnya politik itu memiliki beberapa konsep pokok. Beberapa konsep pokok politik tersebut adalah : politik berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan umum (*public policy*), pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*). Roger F. Soltou mengatakan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganegara, hubungan antara negara dengan negara lain. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi

tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari si pemilik pengaruh. Harold D. Lasswell dan A. Kaplan mengatakan ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Sementara W. A. Robson mengatakan politik sebagai ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yaitu hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil-hasilnya. Fokus utamanya adalah tertuju pada perjuangan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.

B. Lahirnya Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sudah cukup lama berkembang. Perkembangannya bermula sejak tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith (seorang pemikir dan ahli ekonomi Inggris) menerbitkan bukunya yang berjudul "An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations". Beberapa pemikiran hingga kini masih mendapat perhatian dalam pemikiran ahli-ahli ekonomi. Sehingga Adam Smith dianggap sebagai "Bapak Ilmu Ekonomi."

Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang besar dan luas, ilmu ekonomi diberi gelar sebagai *the oldest art, and the newest science*, yang jika diterjemahkan, ekonomi merupakan seni yang tertua dan ilmu pengetahuan yang termuda. Masalah-masalah ekonomi lahir serentak dengan terbitnya matahari kemanusiaan puluhan ribu tahun silam. Tidak ada satu cabang ilmu pun yang lebih tua atau lebih dahulu daripadanya. Mungkin saja ada orang yang beranggapan bahwa ilmu kedokteran yang lebih tua, itu kurang benar sebab ilmu (atau lebih baik disebut dengan "seni" saja dan bukan ilmu, sebab di zaman yang paling awal dari sejarah kemanusiaan itu belum ada ilmu yang memiliki sistematika, disiplin, serta keharusan-keharusan ilmiah yang lain) kedokteran timbul sesudah orang merasa sakit dan ingin

sembuh dari sakitnya itu. Lain halnya dengan ekonomi, yang dirasakan perlunya sejak Nabi Adam AS diturunkan ke bumi bersama Hawa. Kebutuhan mereka akan makanan, pakaian dan tempat tinggal, telah memaksa mereka untuk bergumul dan bergaul dengan masalah-masalah ekonomi.

Hal ini akan tampak kian jelas jika kita ikuti pendapat Georg Friedrich List (1789-1846), seorang ahli ekonomi bangsa Jerman, yang membagi tahap-tahap kehidupan ekonomi manusia diantaranya:

1. Perburuan dan perikanan
2. Peternakan
3. Pertanian
4. Pertanian dan kerajinan setempat
5. Pertanian, industri, perniagaan internasional.

Pembagian List ini memberikan kesan kepada kita bahwa masalah-masalah ekonomi telah dilakukan oleh orang-orang penghuni pertama di bumi, dalam bentuk perburuan dan perikanan.

Pada saat awal-awal kehidupan manusia, istilah ekonomi tentu saja belum ada. Akan tetapi masalah-masalah yang dihadapi manusia-manusia penghuni bumi yang pertama adalah masalah-masalah yang di zaman modern disebut sebagai masalah ekonomi.

Ekonomi sebagaimana kedokteran dan lain-lain, saat itu belum berfungsi sebagai ilmu. Yang ada barulah "seni" ekonomi, yaitu seni mencukupi kebutuhan, seni melengkapi alat-alat berburu dan menangkap ikan (yang saat ini dikenal sebagai melengkapi alat-alat modal), seni penyisihan sebagian makanan untuk dimakan di lain saat nanti (yang saat ini disebut sebagai kegiatan menabung atau saving) dan lain-lain.

Peristiwa pertama yang menandai akan lahirnya ilmu baru yang bernama ilmu ekonomi adalah munculnya istilah ekonomi itu sendiri. Itu terjadi ribuan tahun yang lalu, beratus-ratus tahun sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Entah pada zaman apa, masa pemerintahan raja siapa serta oleh siapakah istilah

ekonomi itu untuk pertama kalinya dilontarkan, tidak ada orang yang mengetahuinya secara pasti. Yang jelas, istilah ekonomi itu lahir di Yunani, dan dengan sendirinya istilah ekonomi itupun berasal dari kata-kata Yunani pula. Asal katanya adalah Oikos Nomos. Betapa sulitnya mencari terjemahan yang tepat untuk kata-kata itu, tetapi orang-orang barat menerjemahkannya dengan *management of household or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan).

Pada saat itu, Yunani adalah negara yang besar dan memiliki kebudayaan yang tinggi. Hampir setiap generasi Yunani kuno berhasil mencetak dan memiliki berpuluh-puluh filosof besar, yang semuanya menjadi penyumbang bagi terbentuknya bangunan Ilmu Pengetahuan kita saat ini.

Diantara nama filosof besar tersebut terdapatlah nama Aristoteles (384-322 SM), yang merupakan murid dari Plato dan cucu murid Socrates. Aristoteles adalah ahli matematika, ilmu pasti dan alam, sekaligus seorang sosiolog dan psikolog, bahkan lebih dari semua itu, ia adalah seorang ulama yang paham benar akan agama, moral dan etika. Ia adalah guru bagi Iskandar Zulkarnain yang agung dan Macedonia.

Selama hidupnya, Aristoteles telah menulis banyak sekali buku tentang segala yang dirasa, dilihat dan dipikirkannya. Berkat ia juga, Oikos Nomos tidak berhenti berkembang. Diantara buku-bukunya yang paling banyak memuat uraian tentang ekonomi adalah buku yang berjudul *Politika* dan *Etika Nicomachea*. Diantara topik-topik yang diuraikannya di dalam kedua buku itu, terdapatlah dasar-dasar teori nilai dan pertukaran, pembagian kerja, serta teori tentang uang, suku bunga dan riba. Namun, karena ia hanyalah hasil didikan sebuah desa kecil serta berhubungan hanya dengan masalah-masalah ekonomi yang dilihat di sekitarnya saja, maka sering kali ia membuat penyerdanaan yang berlebih-lebihan dan generalisasi. Walaupun demikian, ia memahami benar akan lika-liku serta pentingnya arti perdagangan, perniagaan, serta diperlukannya uang sebagai salah satu jenis perantara

atau alat tukar-menukar, dan suatu standar (untuk ukuran dan nilai) yang disepakati dunia.

Satu di antara sumbangan terbesar Aristoteles adalah uraiannya tentang teori nilai. "Pada setiap barang yang kita miliki", tulisnya, "terdapat dua manfaat atau dua penggunaan, yang keduanya dimiliki oleh barang itu sekalipun tidak dalam bentuk yang sama, yang satu adalah penggunaan yang sesuai (proper) sedang yang lainnya adalah penggunaan yang kurang sesuai (improper) atau penggunaan kedua (secondary) bagi barang itu. Misalnya Sepatu, dapat dipergunakan untuk dipakai maupun dipertukarkan dengan barang lain. Keduanya merupakan penggunaan sepatu itu". Berdasarkan tulisan itu, Aristoteles menyatakan bahwa setiap barang tertentu mempunyai nilai pakai dan nilai tukar, atau nilai subyektif dan nilai obyektif seperti yang kita sebut sekarang. "Adapun nilai pakai (utility value) biasa disebut dengan sebutan guna (utility) saja, sedangkan nilai tukar (exchange value) itu disebut dengan sebutan nilai (value) saja. Para ahli ekonomi zaman sekarang memberi gelar Aristoteles sebagai The "First" Economist, Ahli Ekonomi "Pertama".

Sejak zaman Aristoteles itu, ekonomi masih harus melewati masa yang amat panjang untuk sampai kepada bentuknya sekarang. Pada zaman di sekitar abad pertengahan, sebelum zaman Renaissance (kebangkitan), kaum pedagang pernah dianggap pedagang dan pencuri, hanya karena mereka mengambil laba dari usahanya. Di saat itu, tidak sedikit peraturan dibuat orang untuk mengancam pembungahan uang. Alasan pokok untuk keperluan itu adalah ayat-ayat Bibel keluaran 22:25, Imanat Orang Lewi 25:36, Ulangan 23: 19-20, Mazmur 15:5, Yehezkiel sebagai tokoh ekonomi, St. Thomas Aquinas (1225-1274), pernah menyatakan bahwa waktu adalah milik Tuhan sehingga tidak boleh atau jangan dijual dengan uang.

Larangan pembungahan uang dan sistem bunga menjadi salah satu pilar ekonomi dalam pandangan agama. Beberapa ayat Bibel yang menyatakan haramnya bunga seperti tersebut

dapat dibaca oleh siapapun juga hingga hari ini. Selanjutnya nabi yang menjadi penerus Nabi Isa AS, yakni Nabi Muhammad SAW., memperbaharui semangat anti riba itu dengan larangan dan ancaman yang tegas. Al-Quran menyatakan haramnya riba itu secara tegas antara lain di Surah Al-Baqarah ayat 275. Bagian akhir dari ayat itu menyatakan: Barangsiapa yang kembali mengambil riba sesudah ini, maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Nabi Muhammad SAW. menyatakan bahwa ada empat orang yang mendapat dosa karena riba, yakni pemakannya, pemberinya, penulis (kontrak)-nya, dan saksinya. Di lain kesempatan, beliau bersabda bahwa riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu (dosa); yang paling ringan diantaranya adalah sama dengan (dosa) seorang lelaki menyetubuhi ibu kandungnya sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semua agama samawi (Yahudi, Kristen, dan Islam) ternyata sepakat mengharamkan bunga dan memandang pembungaaan uang sebagai perbuatan haram yang dikutuk sekeras-kerasnya.

Sesudah itu, ekonomi masih terus menghadapi badai dan gelombang yang timbul sebagai akibat pertentangan pendapat diantara para pemikir ekonomi. Hal ini diterangkan secara gamblang di dalam mata pelajaran sejarah perekonomian.

Lalu sampailah ekonomi pada bentuknya yang sekarang ini. Sekalipun masih terdapat perselisihan pendapat serta perselisihan paham. Dalam pandangan diantara para ahli maupun diantara bangsa-bangsa. Namun terdapat perbedaan, dahulu semua perselisihan itu bersifat "mencari bentuk" ekonomi yang sesungguhnya. Sedangkan sekarang perbedaan pendapat lebih berbentuk "bagaimana melayarkan bahtera perekonomian menuju tujuan, baik tujuan perorangan maupun bangsa". Dahulu, benturan-benturan yang terjadi di antara para ahli ekonomi adalah benturan-benturan paham, sedangkan sekarang benturan-benturan itu justru lebih merupakan benturan-benturan kepentingan.

C. Mazhab dalam Ilmu Ekonomi

Dalam Ilmu Ekonomi dikenal adanya beberapa mazhab yang mempengaruhinya, yaitu antara lain:

1. Madzab Merkantilis

Merkantilisme berasal dari bahasa latin *mercece* yang berarti jual beli, atau bahasa Inggris *merchant* yang artinya adalah saudagar. Paham ini tumbuh subur di zaman kekuasaan raja-raja abad pertengahan. Tokoh utama mazhab ini adalah Jean Baptiste Colbert, yang juga merupakan menteri keuangan raja Lodewijk XIV.

Pemikiran kaum merkantilis adalah: untuk meningkatkan kekayaan negara, maka negara harus menjual (mengekspor) lebih banyak daripada membeli (mengimpor), serta banyak mendatangkan logam mulia seperti emas dan perak ke dalam negeri. Seorang merkantilis adalah seorang penganut paham bahwa suatu sistem perekonomian yang terbaik adalah suatu sistem dimana negara harus melakukan campur tangan seluas-luasnya terhadap dunia usaha dan perdagangan luar negeri. Terhadap pertanyaan, "apakah sumber kekayaan negara itu?" kaum merkantilis menjawab: *commerce* (perdagangan).

2. Madzab Fisiokrat.

Fisiokrat berakar dari kata-kata Yunani *fisos* yang berarti alam, dan *kratos* yang memiliki arti kekuasaan. Sehingga fisiokratisme berpendirian bahwa alamlah penguasa kekayaan atau dari alam bersumber kekayaan. Pemuka aliran ini adalah Francois Quesnay, dokter pribadi Lodewijk XIV. Ia menolak anggapan kaum merkantilis bahwa kekayaan negara berpusat pada industri dan perdagangan.

Quesnay sendiri meletakkan dasar ajarannya pada dua hal pokok. Pertama, kontrol atau pengendalian atas perdagangan luar negeri dan industri (seperti pada zaman merkantilisme) justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Kedua, semua pajak harus ditanggung oleh

pemilik tanah (Quesnay membedakan antara pemilik tanah dengan petani), sebab kehidupan mereka yang mewah telah menjadi salah satu sebab terhambatnya arus pendapatan di kalangan rakyat. Pendapat Quesnay secara keseluruhan berpangkal atas dua anggapan pokok. *Pertama*, ia percaya semua kekayaan datangnya dari proses yang memberikan kehidupan yang telah diciptakan oleh Tuhan. *Kedua*, kebebasan ekonomi akan menciptakan masyarakat yang makmur dan teratur. Kaum fisiokrat sepakat pada suatu ide dasar, bahwa kekayaan datang dari tanah. Hanya tanahlah yang mempunyai kekuatan pemberi kehidupan yang berasal dari Tuhan.

3. Madzab Klasik.

Tokoh dari aliran ini adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith, kekayaan datang bukan dari perdagangan dan tanah seperti kata orang-orang merkantilis dan fisiokrat, tetapi dari kerja manusia, dan karena kerja manusialah terdapat perdagangan dan pertanian. Setiap individu berusaha untuk menggunakan modalnya sehingga diperoleh hasil yang setinggi-tingginya. Dia pada umumnya tidaklah bermaksud untuk menunjang kepentingan umum dengan perbuatannya itu, dan tidak pula ia tahu sampai seberapa jauhkah penunjangnya itu. Ia berbuat itu hanya untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk keberuntungannya sendiri. Dan dalam hal ini ia dibimbing oleh suatu "tangan gaib" untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan utamanya. Dengan mengejar kepentingan pribadinya seperti itu, ia akan mendorong kemajuan masyarakat dengan dorongan yang seringkali bahkan lebih efektif daripada kalau ia memang sengaja melakukannya.

Dahulu, di zaman pemerintahan Lodewijk XIV, Colbert pernah bertanya kepada seorang industriawan yang bernama Legendre: "apakah yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah bagi kebaikan dunia usaha (*business*)?", Legendre menjawab singkat, "*laizzes nous*

faire (tinggalkan kami sendiri—*leave us alone*)". Akan tetapi, Colbert hanya mencibir bibir saja mendengarkan jawaban Legendre itu. Hanya Adam Smith yang mendengarkan jawaban itu, sesudah berlalu puluhan tahun. Istilah itu yang kemudian disingkat menjadi *laissez faire* lalu menjadi pedoman pokok kaum liberal (pengikut faham Adam Smith), serta menjadi motto kaum kapitalis.

Selain *The Theory of Invisible Hand*, topik lain yang dibahas Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* antara lain tentang kerja sebagai sumber kekayaan; nilai dan penetapan harga; teori pembagian pendapatan yang mencakup sewa, upah dan laba; akumulasi modal dan dasar-dasar ilmu negara.

Selain Smith, tokoh-tokoh madzab klasik antara lain: Thomas Robert Malthus (1766-1834) yang digelar bapak ilmu penduduk, Jean Baptiste Say (1767-1832) yang terkenal karena hukum pasarnya, David Richardo (1772-1823) yang terkenal karena hukum hasil yang semakin menurun (*law of diminishing of return*), dan lain-lain.

Dalam pandangan David Richardo, dalam usaha membangun ekonomi itu kepentingan rakyat banyak harus dinomorsatukan sebab mereka itulah yang akan menikmati hasil kemajuan pembangunan ekonomi itu. Di lain pihak, Malthus berpandangan bahwa kaum pemilik modal adalah tokoh sentral dalam pembangunan ekonomi itu. Jika para pemodal (kaum kapitalis) ini dibebaskan berusaha, usaha itu akan dengan sendirinya memberi manfaat kepada masyarakatdi sekitarnya. Misalnya, ika sebuah pabrik didirikan, demikian jalan berfikir Malthus, pabrik itu akan mengambil penduduk sekitarnya sebagai tenaga kerja, akan dibangun pula jalan, didirikannya sekolah, masjid, rumah sakit, dan sebagainya. Semakin besar pabrik atau perusahaan itu, maka semakin makmur pula penduduk sekitarnya. Jika semua perusahaan dibiarkan maju, maka secara keseluruhan penduduk akan mendapatkan manfaatnya. Dan makmurlah seluruh negeri.

Akan tetapi, ekonomi liberal yang diperkenalkan Smith ini ternyata membawa bencana. Setelah dijalankan di Amerika Serikat, perekonomian jatuh ke tingkat serendah-rendahnya karena para kapitalis yang telah demikian makmurnya masih juga ingin bertambah makmur, dan inilah yang dikenal sebagai zaman *malaise* atau depresi besar. Dan pada kenyataannya, aliran liberalisme amat memanjakan kaum kapitalis.

4. Madzab Keynesian

Hal penting yang diperkenalkan Keynes dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936) adalah tentang kebijakan ekonomi pemerintah yang dikenal dengan kebijakan fiskal. Kata Keynes, untuk mendorong ekonomi yang ambruk, pemerintah harus turun tangan dengan cara melakukan pengeluaran besar-besaran guna membuka usaha sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Menurut Keynes, hanya dengan cara ini perekonomian yang dilanda depresi bisa dipulihkan. Para ahli ekonomi zaman sekarang menyebut aliran ini adalah aliran kapitalisme.

5. Marxisme/Komunisme

Tokoh-tokoh dari aliran ini adalah Karl Heinrich Marx, seorang pendeta Nasrani dari Jerman dan Frederick Engels. Marx sangat merasa rihatin dengan penderitaan rakyat akibat keganasan kaum kapitalis. Pemikiran Marx, karena semakin banyaknya kekacauan yang disebabkan merajalelanya kaum borjuis (kapitalis), alangkah baiknya jika bisa dibangun sebuah masyarakat tanpa kelas, di mana semua orang adalah proletar (masyarakat kebanyakan), dan seluruh kekuasaan ekonomi ada di tangan mereka.

Ide Marx dituangkan dalam buku yang berjudul *Das Kapital* (Modal) yang terbit tahun 1917. Dalam buku ini dinyatakan bahwa negara harus diperintah oleh rakyat dan berbentuk diktator ploreteriat. Pemerintahan oleh rakyat

inilah yang memegang seluruh kekuasaan. Pemerintah hanya melaksanakan pemerintahan atas nama kaum proletar.

6. Aliran Neoklasik

Aliran ini berpendapat bahwa jika terjadi masalah dalam perekonomian, biar perekonomian itu sendiri yang memperbaikinya. Dengan kata lain, kebijakan fiskal yang diperkenalkan oleh Keynes itu tetap mereka nyatakan haram karena mengizinkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan dipakainya kebijakan moneter. Dengan kebijakan moneter ini, mereka mengusulkan agar jika timbul masalah ekonomi maka cukuplah diadakan penyesuaian-penyesuaian di bidang moneter saja. Seperti, seperti menyesuaikan jumlah uang yang beredar dan menetapkan suku bunga. Paham neoklasik ini sering disebut sebagai paham moneterisme.

BAB 2

MENGENAL EKONOMI POLITIK

A. Definisi Ekonomi Politik

Ekonomi politik adalah studi tentang produksi dan perdagangan serta hubungannya dengan hukum, adat dan pemerintahan; juga dengan distribusi pendapatan nasional serta kekayaan negara (Steiner, 2010). Demikian banyak definisi ekonomi politik sehingga pengertian yang sederhana adalah : (a) Ekonomi Politik adalah teori atau studi tentang peran kebijakan publik dalam mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam kaitan politik (Merriam, 2018). (b) Menurut Investopedia (2018), Ekonomi Politik adalah studi tentang produksi dan perdagangan dan hubungannya dengan adat, pemerintah dan hukum. Ilmu ini merupakan studi dan penggunaan teori dan metode ekonomi yang mempengaruhi sistem sosial dan ekonomi yang berbeda dan berkembang, seperti kapitalisme, sosialisme; dll dan juga menganalisis bagaimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan. Karena berbagai individu dan kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dalam suatu negara atau ekonomi yang berkembang, maka Ekonomi Politik dianggap sebagai suatu disiplin ilmu yang kompleks, mencakup beragam kepentingan yang berpotensi terjadinya persaingan.

Sebagai suatu disiplin ilmu, ekonomi politik penuh dengan filsafat moral, yang pada abad ke-18, digunakan untuk mengeksplorasi administrasi kekayaan negara, yang saat itu dikaitkan dengan pengertian pemerintahan (“politik” = pemerintahan dan ‘ekonomi’ yang berarti manajemen rumah tangga dalam bahasa Yunani).

Karya-karya awal dari Ekonomi Politik biasanya dikaitkan dengan ilmuwan Ekonomi Inggris Adam Smith, atau Thomas Malthus maupun David Ricardo, namun pemikir Perancis François Quesnay (1694-1774) dan Anne-Robert-

Jacques Turgot (1727-1781) kemudian memulai untuk membahas Ekonomi Politik atau Political Economy (Steiner, 2010). Pada akhir abad ke-19, istilah "ekonomi" diperkenalkan dengan istilah "ekonomi politik" dengan munculnya pemodelan matematika dari penerbitan buku teks yang berpengaruh oleh Alfred Marshall pada tahun 1890 dan kemudian Ekonomi Politik mulai lebih dikenal pada 1920.

Saat ini, ekonomi politik merupakan pendekatan yang berbeda dan tidak digunakan sebagai sinonim untuk ekonomi, serta dapat merujuk pada hal-hal yang sangat berbeda. Dari sudut pandang akademis, istilah itu bisa merujuk pada ekonomi Marxian, yang menerapkan pendekatan kepada keadaan masyarakat umum. Literatur ekonomi politik lebih berkembang pesat sejak 1970-an sehingga mengarah kepada model kebijakan ekonomi yang memaksimalkan ekonomi politik. Kini, studi Ekonomi Politik merupakan suatu disiplin ilmu yang didalamnya terkait dengan :

1. Ilmu Politik yang mempelajari hubungan kekuasaan dan hubungannya mencapai tujuan yang diinginkan
2. Ilmu Filsafat yang secara ketat menilai dan mempelajari serangkaian keyakinan dan penerapannya pada realitas
3. Ilmu Ekonomi mempelajari distribusi sumber daya sehingga keinginan material masyarakat terpuaskan dalam hubungannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial
4. Ilmu Sosiologi yang mempelajari dampak keterlibatan orang dalam masyarakat sebagai anggota kelompok masyarakat dan bagaimana kondisi itu dapat mengubah kemampuan mereka untuk berfungsi dalam masyarakat
5. Ilmu Antropologi yang mempelajari ekonomi politik dengan menginvestigasi rezim-rezim nilai politik dan ekonomi yang mengkondisikan aspek-aspek praktik sosiokultural
6. Ilmu Arkeologi yang berupaya merekonstruksi ekonomi politik masa lalu dengan memeriksa bukti material untuk strategi administratif untuk mengendalikan dan memobilisasi sumber daya. Bukti ini mungkin termasuk arsitektur, sisa-sisa hewan, bukti untuk lokakarya kerajinan,

bukti adanya pesta dan ritual, bukti impor atau ekspor barang berharga, atau bukti penyimpanan makanan.

7. Ilmu Psikologi , sebagai titik tumpuan dari ekonomi politik dalam mengerahkan kekuatannya mempelajari pengambilan keputusan (tidak hanya dalam harga), tetapi sebagai bidang studi yang mempunyai asumsi model ekonomi politik.
8. Ilmu Sejarah yang digunakan untuk berdebat dalam ilmu Ekonomi Politik,
9. Ilmu Ekologi yang berhubungan dengan ekonomi politik karena aktivitas manusia memiliki pengaruh terbesar terhadap lingkungan, sehingga perhatian utamanya adalah kesesuaian lingkungan untuk aktivitas manusia. Efek ekologi dari kegiatan ekonomi memacu penelitian pada perubahan insentif ekonomi pasar. Selain itu dan baru-baru ini, teori ekologi telah digunakan untuk menganalisa sistem ekonomi.
10. Ilmu Budaya untuk menganalisa kelas sosial, produksi, tenaga kerja, ras, jenis kelamin dan seterusnya.
11. Ilmu Komunikasi yang berhubungan dengan aspek kelembagaan, media dan sistem telekomunikasi. Sebagai bidang studi yang berfokus pada aspek komunikasi manusia, ilmu ini juga memberi perhatian khusus pada hubungan antara pemilik, pekerja, konsumen, pengiklan, struktur produksi dan negara dan hubungan kekuasaan yang ada dalam hubungan ini.

B. Sejarah Ekonomi Politik

Ekonomi Politik studi filsafat dan ideologi yang mempelajari evolusi ide-ide politik dan ekonomi. Ekonomi Politik merupakan perpaduan antara politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, dan sejarah, yang semuanya menyatu untuk mempelajari manusia di dalam masyarakat. Ekonom politik mempelajari ideologi politik, struktur ekonomi, interaksi manusia, sifat manusia, dan teori dalam pemikiran filosofis. Ilmu ini juga merupakan studi yang mempelajari tidak hanya

mekanisme struktur tertentu, tetapi juga berbagai alasan di balik berbagai orang dengan keyakinan yang berbeda. Ilmu Ekonomi Politik awalnya berasal dari Ilmu Ekonomi Klasik. Para pemikir ilmu ekonomi mempunyai dinamika yang luar biasa karena jaman itu memang perekonomian dunia sedang bangkit, hingga sampai kepada sistem kapitalisme muncul. Kapitalisme muncul juga cukup kontroversial karena ia muncul dari kondisi terjadinya feodalisme dan saat itu sedang terjadi Revolusi Industri yang menyebabkan perubahan besar dalam masyarakat.

Munculnya ekonomi politik antar lain adanya istilah "invisible hand" dari Adam Smith dan adanya gagasan bahwa perekonomian dapat mengatur diri mereka sendiri. Adam Smith pun mengikuti fisiokrat Francois Quesnay, bahwa untuk mengidentifikasi kekayaan suatu bangsa dapat tercermin dari pendapatan nasional negara itu, bukan kekayaan yang dimiliki raja. Adam Smith melihat pendapatan nasional ini dihasilkan oleh tenaga kerja, tanah, dan modal. Dengan hak milik atas tanah dan modal yang dipegang oleh individu, pendapatan nasional dibagi antara buruh, tuan tanah, dan kapitalis dalam bentuk upah, sewa, dan bunga atau laba. Dalam visinya, tenaga kerja produktif adalah sumber pendapatan sejati, sementara modal adalah kekuatan pengorganisasian utama, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan.

David Ricardo dan James Stuart Mill kemudian mensistematisasikan teori Adam Smith. Ide-ide keduanya kemudian menjadi panutan ekonomi secara ortodoks pada 1815-1848, apalagi setelah ada reaksi "anti-Ricardian" terbentuk, terutama di benua Eropa, yang akhirnya menjadi ekonomi termarginalkan, lalu muncullah istilah ekonomi marginalis / neoklasik. Pada sekitar tahun 1870-an, setelah usai masa anti Ricardian (David Rocardo), pengaruh Marxisme mulai muncul di tengah suasana ekonomi neoklasi, Henry George adalah ekonom Prancis yang terkenal yang menjembatani teori ekonomi neiklasik yang diungkapkan

dalam tesisnya. Ekonom Mason Gaffney mendokumentasikan sumber-sumber asli Henry George yang kemudian dianggap sebagai Warisan modern.

Ekonomi klasik masih tetap fundamental dalam ekonomi, meskipun teori itu kemudian bergeser menjadi ekonomi neoklasik sejak 1870-an. Apalagi terjadi pula Revolusi Keynesian dan terjadi pula ide-ide klasik lain yang muncul di berbagai sekolah ekonomi. Henry George mempunyai penganut yakni Georgisme (Georgism) dan Karl Marx dengan Marxis dan keduanya menjadi pelopor ekonomi neoklasik. Hingga akhir abad ke-19. Pada pertengahan abad ke-20, minat baru dalam ekonomi klasik memunculkan sekolah neo-Ricardian dan cabang-cabangnya.

Teori ekonomi klasik mulai mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan mulai dilakukan analisis pertumbuhan kekayaan bangsa-bangsa dan mengadvokasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang menjadi fokus utama sebagian besar ekonom klasik. Namun, John Stuart Mill percaya bahwa keadaan stasioner di masa depan akan terjadi, yang berangkat dari ukuran populasi yang konstan, demikian juga persediaan modal konstan yang tidak dapat terhindarkan, sehingga muncullah istilah ekonomi negara konstan yang terkenal.

Para ekonom datang silih berganti : John Hicks & Samuel Hollander, Nicholas Kaldor, Luigi L. Pasinetti, dan Paul A. Samuelson yang masing-masing memiliki model formal dalam masing-masing interpretasi mereka hingga muncullah istilah ekonomi klasik politik. Untuk lebih menyederhanakan pembagian studi ekonomi politik, maka studi ekonomi politik dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, salah satunya adalah Ekonomi Politik Klasik dan yang lainnya adalah Ekonomi Politik Modern. Studi cabang klasik lebih mengarah kepada filsuf konservatif seperti Adam Smith, kritikus liberalisme seperti Marx. Studi-studi cabang modern lebih mengarah kepada kaum liberal sosial , yakni para ekonom politik modern

yang karya-karyanya berurusan dengan banyak masalah termasuk perdagangan luar negeri dan globalisasi.

C. Prinsip Ekonomi Politik

Ilmu Ekonomi Politik sangat dekat dengan ilmu - ilmu lainnya dan sifatnya sangat kompleks sehingga dengan mempelajarinya akan mempunyai pandangan yang lebih luas untuk mendukung ekonomi, sosial dan penerapan politiknya, juga perlu melakukan pendekatan yang menekankan pentingnya proses historis, kekuatan struktural dan institusi dalam membentuk hasil ekonomi. Ekonomi Politik mempunyai peran penting untuk dipelajari, bagaimana melakukan kebijakan dari hubungan ekonomi serta politik; dengan mempertimbangkan hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi, sejarah kapitalisme, ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi, siklus ekonomi, neoliberalisme dan peran keuangan dalam perekonomian, sangat berkaitan dengan politik. Oleh karenanya, Ekonomi Politik merupakan jalan untuk bersikap kritis dan memotong jalur untuk melihat dengan cara sederhana melihat dunia.

Ekonomi politik pada dasarnya adalah tentang bagaimana mengatur dan menyediakan kebutuhan dasar (dan lebih kompleks) manusia yang mempunyai perbedaan dalam kehidupan mereka. Ekonomi politik peduli dengan perbedaan pandangan manusia tentang ekonomi dan politik yang lebih dari sekedar ekonomi neoklasik. Ekonomi juga bukan hanya tentang matematika; tetapi juga tentang sejarah ekonomi dan sejarah pemikiran ekonomi. Oleh karena pandangan manusia berbeda, maka Ekonomi Politik mengajarkan pendekatan pluralisme terhadap ekonomi dan bisnis serta politik. Kebenaran ekonomi tidak ditemukan dalam pasar keuangan, demikian pula adanya kelebihan dan kekurangan dalam perdagangan bebas, globalisasi, dan pembangunan ekonomi, harus dipandang sebagai bagian kompleks dari Ekonomi Politik.

Prinsip Ekonomi Politik diperkenalkan pertama kali oleh John Stuart Mill pada 1848 melalui peluncuran bukunya yang berjudul *Principles of Political Economy* pada pertengahan abad kesembilan belas (Hollander, 1985). Prinsip dasar Ekonomi Politik kemudian disebarluaskan Samuel Hollander dan ia diakui sebagai salah satu sejarawan pemikiran ekonomi yang paling penting dan kontroversial. Samuel Hollander menerbitkan buku Volume kedua dengan mengumpulkan esai bersama tentang ekonomi klasik, subjek yang paling terkait dengannya. Koleksi ini meliputi: “ Studi dalam makalah skolastik, Smithian, dan Marshallian “, “perselisihan pasca-Ricardian, dan revolusi marjinal’, termasuk empat studi bibliografi. Prinsip dalam Ekonomi Politik yang diuraikan oleh Mill (2009) adalah sebagai berikut :

1. Tanah, Tenaga Kerja dan Modal Sebagai Faktor Produksi Mill (2007) menguraikan bahwa prinsip utama dalam Ekonomi Politik adalah produksi, kebutuhan produksi dan syarat-syarat produksi, Selain itu juga kebutuhan tenaga kerja dan modal. Mill (2007) juga membahas mengenai buruh yang tidak produktif, adanya konsumsi yang produktif dan tidak produktif, serta modal untuk melakukan produksi yang terus menerus. Mill (2007) menekankan bahwa dalam Ekonomi Politik, produksi merupakan faktor fundamental dalam ekonomi yang akan berpengaruh kepada politik.
2. Pentingnya hal-hal yang terkait dalam menjalankan faktor produksi Mill (2007) menguraikan perlunya peningkatan modal untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja, modal juga berguna bagi sebuah negara untuk pemulihan dari kehancuran. Selain itu, Mill (2009) juga menguraikan tentang berinvestasi dan pemanfaatan modal untuk efisiensi berproduksi, serta bagaimana mencapai tingkat produktivitas yang baik.
3. Pentingnya Hukum-hukum yang Timbul Hukum-hukum tentang peningkatan tenaga kerja dan produksi juga timbul dari aktivitas produksi. Hukum Peningkatan Produksi

tergantung dari 3 elemen : buruh - modal- tanah. Mill (2009) juga membahas Hukum Penduduk dan Kependudukan. Hukum Produksi atas tanah yang digunakan, Hukum Modal, Hukum Supply dan Demand, dan semua hukum yang timbul karena berkaitan dengan produksi.

4. Pentingnya Menabung Mill(2009) juga menguraikan perlunya menabung untuk terutama agar terus dapat memproduksi.
5. Pentingnya Memperhatikan Hal-hal lain di luar Produksi Masalah populasi, perdagangan, imigrasi, distribusi, property, upah, bea cukai, keuntungan produksi, sewa tanah, harga, biaya, fungsi uang, paham-paham sosialis, kredit, perbankan, *supply* berlebih, perdagangan internasional, ekspor-impor, distribusi, logam mulia, pembayaran internasional, nilai tukar, permintaan domestik, suku bunga bank, surat berharga, dll mempengaruhi kelangsungan dan kelancaran aktivitas manusia memproduksi, sehingga dibahas dalam prinsip ekonomi politik.

Prinsip dalam Ekonomi Politik harus dipandang dalam perspektif filosofi, yang tidak berfokus tentang isi dari ekonomi dalam arti sesungguhnya, tetapi kepada tindakan yang diambil pada pengambilan keputusan karena berhubungan dengan halhal lainnya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Meski demikian, banyak pengamat yang berpendapat, bahwa pendiri ilmu ekonomi, Adam Smith, merupakan orang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu ekonomi politik di dunia.

D. Pembagian Ekonomi Politik

Ekonom Politik secara umum sangat memperhatikan alokasi sumber daya yang langka di dunia menghadapi keinginan dan kebutuhan manusia yang tak terbatas(fundamental dasar ilmu Ekonomi). Hampir semua negara berpedoman bahwa sumber daya alam ditujukan untuk

kesejahteraan rakyatnya. Untuk mengalokasikan sumber daya tersebut, setiap negara menggunakan politik. Jadi secara umum, Ekonomi Politik adalah studi tentang hubungan antara individu dan masyarakat, dan lebih khusus lagi, hubungan antara warga dan negara.

1. Ekonomi Politik Klasik.

Ekonomi politik klasik awalnya disebut sebagai ekonomi klasik, karena ilmu ekonomi politik berasal dari ilmu ekonomi klasik. Ekonomi politik klasik adalah studi pemikiran di bidang ekonomi yang berkembang, terutama di Inggris, pada akhir abad ke-18 dan awal hingga pertengahan abad ke-19. Pemikir ekonomi seperti Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill akhirnya menjadi para pemikir Ekonomi Politik Klasik. Para ekonom ini menghasilkan teori ekonomi pasar sebagai sistem yang mengatur diri sendiri, yang disebut oleh Adam Smith sebagai "the invisible hand" (tangan yang tak terlihat). Adam Smith dengan bukunya yang terkenal "The Wealth of Nations" pada 1776 dianggap menandai awal dari ekonomi klasik. Pesan mendasar dari buku Adam Smith adalah kekayaan negara di dunia, berdasarkan pendapatan nasionalnya. Pendapatan ini didasarkan pada tenaga kerja dari penduduknya, dan hal itu mudah dicapai oleh pembagian kerja dan penggunaan modal akumulasi, yang menjadi salah satu konsep sentral ekonomi klasik. Dalam konteks kebijakan ekonomi, para ekonom klasik telah berubah menjadi liberal pragmatis, mengadvokasi kebebasan pasar, meskipun mereka memiliki peran bagi negara dalam menyediakan kebaikan bersama. Adam Smith memperingatkan berulang-ulang bahaya monopoli, dan menekankan pentingnya persaingan. Dalam mendukung perdagangan bebas, ia menganjurkan agar setiap negara melakukan proteksionisme. Pemikir Karl Marx sebenarnya ia seorang pemikir ekonomi klasik, namun seiring berjalannya

waktu, apalagi ada masa yang disebut sebagai neoklasik, maka ia menetapkan diri sebagai bagian dari Marxisme.

2. **Ekonomi Politik Modern** Ekonomi Politik modern adalah studi tentang Ekonomi Politik setelah masa Ekonomi Politik Klasik dan Neoklasik dan seringkali dikaitkan dengan Marxisme atau Kapitalisme maupun Liberalisme. Marxisme mempunyai arti bahwa kekayaan berasal dari kerja manual dan pertukaran, bukan kecerdikan dan semua individu harus mendapat manfaat dari ekonomi. Dalam negara dengan paham Marxisme, terjadinya ketimpangan merupakan hal yang buruk. Ekonomi dianggap sebagai sebuah permainan tambah kurang, Negara berdasarkan Nasionalisme Ekonomi, artinya kekayaan berasal dari penggunaan kekuasaan, dan penggunaan kekuasaan memfasilitasi akumulasi kekayaan. Setiap individu harus bekerja untuk menguntungkan kekayaan dan kekuatan negara. Bagi sebuah negara yang berdasarkan nasionalisme ekonomi, maka posisi negara itu penting, tetapi individu tidak terlalu penting.

E. Tujuan Ekonomi Politik

Mempelajari Ekonomi Politik bertujuan agar dapat memahami masalah yang dihadapi dalam dunia ekonomi politik dan memungkinkan untuk berfokus kepada solusi permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diperoleh keterampilan dan pengetahuan analitis mengatasi masalah ekonomi politik yang ada. Selanjutnya dapat melakukan studi tentang kebijakan-kebijakan yang ada, bahkan mengusulkan kebijakan yang membuat kondisi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, kejadian masa lalu dapat dijadikan suatu pelajaran berharga dan menjadi landasan untuk menganalisa dan mengambil keputusan terbaik.

BAB 3

KAITAN EKONOMI DENGAN POLITIK

A. Pentingnya memahami Ekonomi Politik

Pembelajaran Ilmu Ekonomi Politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik (Rachbini, 2002).

Ilmu ini mengkaji dua jenis ilmu yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik (Rachbini, 2002). Dalam penggunaannya secara tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai sinonim atau nama lain dari istilah ilmu ekonomi (Rothschild, 1989; dalam Rachbini, 2002).

Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik ; yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik (Rachbini, 2002).

Adanya kelemahan instrumental ini menyebabkan banyak kalangan ilmuwan dari kedua belah pihak-berusaha untuk mempertemukan titik temunya, sehingga para ilmuwan ini berusaha untuk mencoba mengkaji hal ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik (Martin, 2003).

Dalam upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh terlepas dari sistem ekonomi di negara yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada, terdapat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorientasi pasar (ekonomi

liberal) dengan sistem ekonomi terencana atau yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat (sosialis). Sehingga dalam studi ekonomi politik akan ditemui masalah atau pertanyaan yang sama peliknya mengenai bagaimana faktor-faktor politik itu memengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu Negara (Lane, 1994).

Politik dan ekonomi ialah dua hal yang saling berhubungan erat. Ilmu ekonomi dan ilmu politik bak dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, mutlak bagi para politisi untuk memahami ilmu ekonomi dan sebaliknya. Penjelasannya sederhana, jika seorang politisi ingin berkuasa, dia harus meyakinkan pemilih bahwa program ekonomi yang dia usung akan menguntungkan pemilihnya. Misalnya, bagaimana politisi itu bisa meyakinkan pemilih bahwa ketika dia berkuasa harga pangan murah, menyediakan lapangan kerja, dan lain-lain. Bagaimana politisi mencapai indikator-indikator ekonomi itu. Untuk memahami indikator-indikator ekonomi dengan baik, maka *back-up* yang kuat dari tim ekonomi sangat diperlukan. Isu-isu ekonomi apa yang hendak diangkat harus dipikirkan mendalam dan berdasarkan fakta dan data yang ada. Tim ekonomi paling tidak, pernah mendapatkan mata kuliah mikroekonomi dan makroekonomi. Sehingga, pemahaman secara menyeluruh tentang bagaimana ekonomi bekerja.

Kenapa Margaret Thatcher dan Ronald Reagan bisa menjalankan karier politik mereka dengan baik? Salah satunya karena didukung ahli ekonomi yang kuat, seperti Milton Friedman, Keith Joseph, dan Friedrich Hayek. Di tahun politik yang intesitasnya semakin hari semakin memanas, masyarakat terkadang dibuat kebingungan dengan isu-isu ekonomi yang dikemukakan para politisi. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap indikator-indikator ekonomi menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi para politisi.

Bagi partai oposisi, isu-isu ekonomi dapat diangkat untuk mengkritisi pencapaian pemerintah yang sedang berkuasa. Bagi incumbent, kinerja ekonomi menentukan

seberapa besar keberhasilan partai incumbent itu untuk berkuasa kembali. Siapa pun itu, masyarakat hendaknya disajikan debat ekonomi yang berkualitas, bukan isu ekonomi yang digoreng untuk kepentingan sesaat.

B. Keterkaitan antara Ekonomi dan Politik

Jika ditinjau dari segi kehidupan masyarakat pengaruh ilmu politik dan ekonomi jelas saling bergantung, keduanya saling membutuhkan, bisa dikatakan salah satu diantara keduanya tidak bisa berjalan tanpa iringan satu sama lain. Maka lazimnya untuk mempelajari kedua pelajaran ini amat terkait dan terhubung. Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Karena dimasa itu pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan Negara, Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan independent dan terpisah dari pelajaran politik, dimana pelajaran ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana, dimana, apa dan gimana mengatur dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan.

Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya di beberapa titik saja, dimana titik penghasilan dan penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya didalam pemerintahan. Bahkan juga disebabkan dari berbagai penyelesaian permasalahan yang memang lazim timbul didalam Bernegara. Di berbagai Negara pemerintahan pengaruh yang terbesar terletak pada pertumbuhan ekonominya. Bertambahnya lapangan ekonomi didalam pemerintahan terjadi tiada henti- hentinya. Pajak, UU bea, Hak milik Negara dan pertolongan Negara terhadap lahan pertanian, industri dan perdagangan semuanya bukanlah salah satu hal dimana pemerintah berkuasa atas penghasilannya.

Kesejahteraan Negara yang baik dan sosialisme telah merombak keadaan fungsi Negara. Negara dewasa ini diartikan atau disangka langsung turut campur dalam

bermacam lingkungan, dari aktifitas masyarakat menentukan perintah dalam hal kualitas distribusi kekayaan dan juga materi barang milik masyarakat. Tentu saja banyak permasalahan yang timbul dalam pemerintahan modern yang lahir dari dasar ekonomi, tuntutan terhadap lapangan kerja, modal hak milik tanah, ketidakrataan penurunan dan kenaikan ekonomi, bahkan pesatnya kemajuan teknologi yang mempengaruhi nasionalisasi. Perlu kita ketahui dalam Negara Komunis, Negara mengontrol secara keseluruhan kesatuan kehidupan ekonomi masyarakat.

Golongan dan grup ekonomi disetiap Negara terlaksana terus menerus dimana tertekan dalam administrasi untuk perlindungan dan kekayaan. Demikian pula, penggunaan kondisi ilmu ekonomi memiliki pengaruh besar dalam cita-cita perpolitikan dan institusi, Contohnya: adanya revolusi yang menimbulkan cita-cita kemerdekaan perseorangan, demokrasi, sosialisme dan komunis. Dengan demikian eratnya hubungan antara ilmu politik dan juga ilmu ekonomi maka muncullah suatu ilmu baru yang kita kenal dengan sebutan ilmu ekonomi politik. Pembelajaran Ilmu Ekonomi Politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Ilmu ini mengkaji dua jenis ilmu yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik. Dalam penggunaannya secara tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai sinonim atau nama lain dari istilah ilmu ekonomi (Rothschild, 1989).

Di Negara-negara liberal yang mengidolakan demokrasi bukannya tidak ada dominasi ekonomi. Di Amerika Serikat misalnya, walaupun terjadi *free fight* tetapi perekonomiannya yang kuat tampak sangat mempengaruhi pemilihan umum, bahkan mereka yang berdarah yahudi dapat berkiblat di Israel. Sehingga ada momok dalam kongres bahwa siapa yang menentang akan disingkirkan. Di Negara-negara yang

berkembang, Negara mempunyai tugas yang relative lebih banyak dan berat dalam semua sector kehidupan, terutama dalam sektor perekonomian. Tugas Negara menciptakan kesejahteraan tidak terbatas pada suatu golongan tertentu dalam masyarakat dan terbatas dengan waktu.

Hubungan yang lebih jelasnya, dalam mengajukan kebijakan atau siasat ekonomi tertentu, seorang sarjana ekonomi dapat bertanya kepada seorang ilmu politik, tentang politik manakah kiranya yang paling baik di susun guna mencapai tujuan secara ekonomi. Dalam mengajukan kebijakan untuk memperbesar produksi nasional misalnya, sarjana ilmu politik pasti ditanya tentang bagaimana cara-cara menanggulangi hambatan politis menuju arah tujuan ekonomi tersebut. Contohkan saja pembangunan lima tahun di Indonesia dulu memperhitungkan pula perkembangan sosial dan politik yang mungkin terjadi akibat pergeseran ekonomis yang timbul dari berhasil dan gagalnya kebijakan tertentu. Sebaliknya seorang sarjana ilmu politik dapat meminta bantuan juga kepada sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang harus di penuhi guna mencapai tujuan politis tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan demokrasi.

Dengan pesatnya berkembangnya ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama ilmu politik dan ilmu ekonomi makin di butuhkan untuk menganalisis siasat-siasat pembangunan nasional. Semua orang tidak akan bisa mengabaikan lagi pengaruh dan peran perdagangan luar negeri, bantuan luar negeri serta hubungan ekonomi luar negeri pada umumnya terhadap usaha-usaha pembangunan luar negeri. Menurut (Miriam Budiardjo 2009) ilmu ekonomi malahan telah menghasilkan suatu bidang ilmu politik yang baru. ini dinamakan pendekatan perilaku rasional (rational choice) yang lebih cenderung melihat manusia sebagai mahluk ekonomi (economic creature). Dianggap manusia dalam mengambil keputusan selalu memperhitungkan untung rugi baginya.

Analisis ekonomi memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Setiap manusia pasti berusaha mengatur kebutuhan ekonominya, maka dari itu ilmu ekonomi sangat berperan penting di sektor kebutuhan manusia.
2. Analisis ekonomi sangat berperan penting bagi suatu daerah, baik daerah kecil maupun besar seperti negara, karena ilmu ini dapat meningkatkan taraf hidup Sumber Daya Manusia.
3. Analisis ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial / masyarakat.
4. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa Sosial dan bersifat teliti (cermat) serta ekonomis.
5. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak.
6. Melakukan analisis ekonomi sangat penting ,dan hal pokok bagi setiap masyarakat khususnya dalam ruang lingkup keluarga, tujuannya agar dapat dengan cermat mengatur skala prioritas kebutuhan dari keperluan yang terpenting/ mendesak terlebih dahulu.
7. Analisis ekonomi digunakan untuk membantu manajer perusahaan dalam mengambil keputusan dan menetapkan anggaran yang diperlukan.

Secara umum terdapat tiga makna tujuan melakukan analisis politik, yaitu:

1. Perspektif Intelektual. Adalah tindakan politik yang diperlukan pembelajaran untuk memperbesar kepekaan pembelajaran sehingga ia dapat bertindak. Tujuan tidak lain adalah untuk menelaah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para penguasa dan berusaha untuk mengurangi ketidaktahuan dari mereka yang dikuasai.
2. Perspektif politik. Adalah pandangan intelektual mengenai politik tidak banyak berbeda dengan pandangan politis. Sedangkan intelektual dapat menjadi politis jika ia mampu memasukan masalah politik dalam pelayanan suatu

kepentingan ataupun tujuan. Tujuan utama politis adalah mempertahankan kekuasaan.

3. Perspektif ilmu politik. Adalah politik dipandang sebagai ilmu. Ia menilai politik dari sisi intelektual dengan pertimbangan kritis serta memiliki kriteria yang sistematis. Pendiran ini memandang terhadap kebutuhan kedepan, untuk meramalkan akibat tindakan politik maupun kebijaksanaan para politis.

BAB 4

IDEOLOGI UTAMA DALAM EKONOMI POLITIK GLOBAL ANTARA MERKANTILISME DAN LIBERALISM

A. Merkantilisme dan alasannya

Dari sudut pandang historis, merkantilisme adalah yang tertua dan dapat dianggap sebagai teori penting dalam ekonomi internasional, karena menyumbang pemikiran sistem “paksaan” sebagai dasar di semua negara-bangsa. Perkembangan merkantilisme klasik dikaitkan dengan bangkitnya negara-bangsa modern di Eropa pada abad ke 15-18. Ini adalah periode waktu ketika gagasan intervensi negara di pasar untuk tujuan memperkuat keamanan negara dan bangsa, maka mereka mendominasi pemikiran ekonomi politik. Selain itu, sebagai pengalaman pelajaran yang jelas dari sejarah perang Eropa serta persaingan antara kekuatan Eropa untuk hegemoni yang di masyarakat, para ekonom pada waktu itu merebut wilayah sebagai prioritas pertama negara dengan alasan untuk melindungi keamanan dan kemandirian nasionalnya, maka negara harus menciptakan dan mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Menurut merkantilis, negara-bangsa hanya bisa mencapai kekayaan dan kekuasaan dengan kemampuan militer dan ekonomi mereka yang efisien untuk melindungi diri dari penjajah asing (Widodo, 2017).

Kekayaan dan kekuasaan dianggap sebagai dua bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembangunan negara dan bangsa yang makmur dan aman. Dalam arti tertentu, kekayaan dan kekuasaan berputar dalam lingkaran setan sehingga tujuan akhirnya adalah menghasilkan kekayaan, yang pada gilirannya meningkatkan kekuatan. Dengan demikian, jika sebuah negara gagal melindungi dirinya dari penjajah asing, negara tersebut akan digulingkan dan berakhir dalam kelemahan dan kemiskinan. Artinya, Negara harus kaya, menghasilkan bangsa

yang kaya dan diisi oleh orang-orang yang kaya, sehingga bagi yang tampak miskin, lemah dan tampak rentan, mungkin menjadi seperti beda dan aneh.

Kunci penting untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan, dari perspektif merkantilisme, adalah mempromosikan ekspor dan membatasi impor untuk menghasilkan nilai surplus perdagangan yang kemudian menjadi kekayaan dan kekuatan negara. Kekayaan dan kekuatan negara-bangsa dievaluasi berdasarkan akumulasi emas dan perak. Oleh karena itu, sistem perdagangan yang menguntungkan lebih sedikit impor dan lebih banyak ekspor. Hasil perdagangan yang baik diukur dengan selisih ekspor terhadap impor dan jumlah emas yang diterima dari perdagangan. Pandangan ini tercermin dengan jelas dalam penulisan merkantilisme pada abad 16, 17 dan 18. Seketika, Blaug dan Mark mencantumkan beberapa fitur penting mengenai kebijakan perdagangan merkantilisme yang membantu negara-bangsa mengumpulkan emas dan perak. Mark menekankan peraturan perdagangan luar negeri untuk menghasilkan arus masuk sebanyak mungkin dari emas dan perak.

Untuk itu, pemerintah terlebih dahulu harus mempromosikan industrinya dengan mengimpor bahan baku murah sambil menerapkan kewajiban protektif atas barang-barang manufaktur impor. Ekspor harus didorong, terutama barang jadi, dan yang paling penting adalah penekanan pada pertumbuhan penduduk, sehingga tidak membebani Negara dan masyarakat sejahtera. Kebijakan ini atas membawa banyak keuntungan bagi monopoli dalam bisnis manufaktur seperti East India Company selama abad ke-17 dan ke-18. Sebenarnya, model perdagangan ini dapat dilihat saat menelusuri kembali penjajahan Inggris di India bahwa East India Company telah mendukung pedagang kaya dan bangsawan bahwa mereka menjual barang-barang manufaktur ke koloni dan menerima emas, perak, bulu, kayu, bahan baku, dan tenaga kerja murah. Seorang trader dan direktur East India Company yang sukses, Thomas Mun mengatakan bahwa itu adalah keseimbangan

positif dari perdagangan yang sangat penting bagi Inggris untuk mengejar kekayaan.

Fitur lain yang perlu di perhatikan dari merkantilisme adalah bahwa semua kegiatan ekonomi ditentukan oleh negara. Dengan menekankan pada kekayaan sebagai komponen kekuatan yang sangat diperlukan, merkantilis berpendapat bahwa kegiatan ekonomi terlalu penting yang harus dilakukan melalui proses yang menyeluruh untuk menentukan bagaimana mana sumber daya masyarakat berada. Selanjutnya, ada analisis dari perspektif merkantilis bahwa hanya dengan dukungan pemerintah, apakah "industri pemula" mampu berkembang dalam jangka panjang. Dengan demikian, merkantilis menambahkan bahwa proses yang "tidak terkoordinasi" akan menghasilkan struktur ekonomi yang "tidak tepat"; oleh karena itu negara harus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan ekonomi.

Secara umum, merkantilisme harus dipandang sebagai komitmen untuk membangun negara dan bahwa literatur merkantilis itu besar dan beragam. Namun, menurut Thomas Oatley, merkantilis pada dasarnya mematuhi tiga proposisi utama berikut. Pertama, merkantilitas klasik berpendapat bahwa kekayaan dan kekuasaan nasional memiliki hubungan yang erat, yang berarti bahwa dalam sistem internasional, kekuatan nasional terutama berasal dari kekayaan. Kedua, kekayaan hanya bisa diperoleh dari perdagangan, dan satu-satunya cara untuk memiliki keseimbangan perdagangan adalah dengan mendorong ekspor dan mencegah impor kapanpun memungkinkan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kekayaan dan kekuasaan merupakan ujung akhir dari sebuah kebijakan suatu bangsa. Akhirnya, beberapa merantil klasik percaya bahwa beberapa kegiatan ekonomi lebih berharga daripada yang lain. Sebagai contoh, merkantilis klasik menganggap bahwa kegiatan manufaktur lebih penting untuk dipromosikan daripada kegiatan pertanian dan kegiatan nonmanufaktur lainnya.

B. Kekuatan dan Kelemahan Merkantilisme

Kekuatan merkantilisme terdapat adalah dominasi negara-negara sebagai alat pembangunan ekonomi dan aktor utama dalam hubungan internasional. Meski dalam perkembangan ekonomi modern, banyak yang berpendapat bahwa kerangka perdagangan telah menjadi usang, ekonomi politik "patriotik" semacam ini masih dapat ditemukan di mana-mana di dunia saat ini. Ada masyarakat yang bekerja keras menciptakan usaha negara yang kuat untuk mengatur dan mengelola ekonomi nasional mereka. Misalnya, banyak ekonom di negara-negara berkembang menganggap pembangunan nasional dan pembangunan bangsa sebagai proses untuk menyesuaikan dengan industrialisasi negara-negara Barat lainnya. Dengan demikian, mereka di satu sisi mempertimbangkan untuk mempromosikan industri dalam negeri, namun di sisi lain, mereka mengambil tindakan pencegahan terhadap "industri pemula mereka" di antara negara-negara industri dewasa lainnya.

Pada 1980-an dan 1990-an, keberhasilan ekonomi Jepang dan negara-negara industri baru lainnya (Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan) menjadi topik hangat para ekonom. Mereka membandingkan keberhasilan ekonomi baru dengan Amerika Serikat dan negara-negara industri lainnya. Ekonom Lester Thurow berpendapat bahwa itu adalah keinginan Jepang untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia, yang memotivasi mereka untuk maju dari yang lain. Sebenarnya, tujuan untuk mendapatkan lebih banyak keamanan di dunia yang "tidak dapat diprediksi" ini juga menjadi salah satu alasan bagi negara-negara untuk mempraktekkan merkantilisme sampai hari ini.

Selanjutnya, merkantilisme menyediakan kerangka kerja seperti itu yang menekankan pentingnya keamanan dan kepentingan politik. Dengan melakukan hal itu, Merkantilisme memberikan keamanan (kekuatan militer) untuk negara yang dipandang sebagai prasyarat penting bagi stabilitas ekonomi dan ekonominya dalam sistem negara kompetitif. Untuk

menggambarkan kekuatan merkantilisme dalam kasus ini, perlu mengambil kasus Perusahaan Hindia Timur Belanda untuk melihat bagaimana merkantilisme berhasil dalam aktivitas ekonomi mereka. Pada awal abad ke- 17, Belanda baru saja mendapatkan kemerdekaan mereka dari Spanyol dan mulai mendirikan Perusahaan Hindia Timur Belanda.

Sejak Portugis memulai jalan laut Far East untuk menjalankan kegiatan ekonomi mereka, Inggris dan kemudian Belanda mengikuti kekalahan ini. Belanda menggunakan teknologi kapal mereka untuk terlibat dalam perdagangan dan penjajahan di berbagai belahan planet ini. Tidak seperti banyak perusahaan besar lainnya pada masa itu, Perusahaan Hindia Timur Belanda dilengkapi dengan tentara dan angkatan laut itu sendiri.

Perusahaan juga memiliki hak monopoli (hak diberikan di kalangan orang Belanda) untuk mendirikan kegiatan ekonomi di Asia. Pada tahun 1602, Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oost - Indische Companie, VOC) adalah asosiasi pedagang yang bekerja sama dengan tujuan untuk melakukan ekonomi dalam skala yang lebih besar, berbagi risiko, dan mengurangi persaingan. Pada saat yang sama, di sana ada Perusahaan India Timur - dari Portugal sampai Swedia - banyak pedagang telah pergi - namun mereka tidak meraih kesuksesan sebanyak VOC.

Menurut John (2008) predikat VOC dalam perdagangan rempah-rempah telah memberi kontribusi pada kekuatannya yang kemudian membantu menciptakan dan mempertahankan hubungan pasar. Pada tahun 1670, VOC menjadi perusahaan terkaya di dunia, memberikan dividen tahunan 40% atas investasi mereka, walaupun membiayai 50.000 karyawan, 30.000 orang yang berperang dan 200 kapal, banyak di antaranya dipersenjatai. Jelas bahwa kegiatan ekonomi VOC berdasarkan kerangka politik, dilakukan untuk menjadi perusahaan ekonomi yang paling efektif dalam dunia kelompok dan negara yang kompetitif. Dengan perabotan lengkap dari segi kekuatan militer, VOC tidak hanya

menerapkan kebijakan dan peraturan ekonomi pada penduduk setempat, namun juga memiliki kemampuan untuk mencegah persaingan dari pedagang dan penjajah Eropa pesaing lainnya pada saat bersamaan. Tentu saja, kerangka ini menuntut sejumlah besar uang untuk membeli senjata dan tentara pendukung. Oleh karena itu, dalam sistem merkantilisme, model ekonomi ini mengandalkan monopoli untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi.

Dari sudut pandang bahwa kerangka ekonomi merkantilisme itu mahal, banyak ekonom liberal berpendapat bahwa kerangka ekonomi merkantilisme bersifat konflik karena beberapa negara bersaing untuk industri yang diinginkan dan terlibat dalam konflik perdagangan sebagai konsekuensi dari kompetisi ini, yang merupakan salah satu kelemahan dari merkantilisme.

Kelemahan merkantilisme adalah bahwa pemerintah memandang kekuasaan negara dalam hal "permainan zero-sum", yang berarti jika sebuah negara memperoleh, negara-negara pesaing lainnya pasti kalah. Dalam perspektif ini, perdagangan, investasi, dan hubungan ekonomi dimasukkan ke dalam konsepsi konflik. Asumsi ini berpendapat bahwa ia tidak memiliki hubungan ekonomi internasional yang benar karena ada kemungkinan keuntungan bagi semua jika kerja sama terjadi. Pola pikir yang percaya bahwa ketergantungan pada negara-negara lain akan mengarah pada negara-negara yang lemah dan rentan jika ketentuan impor diputus. Keyakinan semacam itu menciptakan lingkungan dan konflik yang tidak bersahabat karena semua negara-bangsa mengejar kekayaan dan kekuasaan. Di sini kasus Perusahaan Hindia Timur Belanda pada abad ke-17 kembali menjadi contoh.

Pada saat Belanda sukses dengan perdagangan mereka, Prancis dan Inggris adalah pesaing bisnis mereka di abad ke-17. Jean-Baptiste Colbert, menteri keuangan Prancis merencanakan sebuah kebijakan industri strategis untuk menggantikan posisi dominan Belanda saat ini dalam perdagangan internasional. Rencana Jean pertama kali menginvestasikan lebih banyak

pada industri pembuatan kapal untuk mengembangkan armada perdagangan Prancis. Kemudian dia berusaha memperkuat industri manufaktur Prancis dan melindunginya dari pesaing asing dengan menerapkan tarif impor.

Bersamaan dengan itu, dia juga memberi sanksi kepada produser produk standar. Kenaikan tarif impor di Perancis menyebabkan fakta bahwa negara lain juga memberlakukan tarif yang lebih berat. Proses ini merupakan unsur konstitusional yang menyebabkan Perang Belanda antara tahun 1672 dan 1678. Perang Anglo- Belanda pertama antara 1652 dan 1657 juga merupakan pertarungan di laut antara angkatan laut yang disebabkan oleh perselisihan mengenai perdagangan.

Faktor utama yang menyebabkan ketegangan antara kedua negara adalah Undang-Undang Navigasi Pertama yang disahkan pada tahun 1651. Dalam Undang-undang tersebut ada deklarasi bahwa semua shippings barang impor dilarang kecuali barang-barangnya dibawa oleh kapal Inggris. Jelas bahwa premis merkantilisme pada dasarnya adalah sebelum kepentingan nasional dalam hal bahwa kebijakan tersebut menguntungkan pasar domestik dan mengalahkan industri asing. Menjelaskan alasan mengapa pedagang Inggris sangat menentang Belanda, Jonathan Israel dalam bukunya yang berjudul "Konflik dan Kekayaan" menyebutkan bahwa ini karena pedagang Inggris berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pedagang Belanda saat Belanda memperoleh nilai yang lebih besar, yaitu pangsa pasar. Respon terhadap situasi ini, pedagang Inggris menciptakan beberapa traktat yang bertujuan untuk melindungi perdagangan luar negerinya, pengiriman dan industri lain yang dimilikinya. Melihat sifat hubungan ekonomi internasional sebagai permainan zero-sum, asumsi dasar merkantilisme adalah bahwa inti dari hubungan ekonomi bersifat konflik. Oleh karena itu, perjuangan antar negara untuk sumber ekonomi itu inheren dan tak terelakkan. Namun, semua kegiatan perlombaan senjata dan latihan untuk militer mahal harganya.

Kemungkinan ini menyebabkan defisit anggaran dan inefisiensi ekonomi. Selain itu, pengembangan industri tanpa memperhatikan situasi pasar atau keunggulan komparatif dapat melemahkan masyarakat secara ekonomi. Seperti yang dikatakan Adam Smith bahwa saat ini kecenderungan untuk mengidentifikasi industri dengan kekuatan bahkan dapat menderita ekonomi Negara (Widodo, 2017).

C. Liberalisme dan Alasannya

Merkantilisme dan liberalisme berdiri di sisi yang berlawanan. Merkantilisme menekankan peran kebijakan nasional dalam ekonomi operasi, liberal sebaliknya membedakan ekonomi dengan politik dan menganggap bahwa masing-masing domain beroperasi sendiri karena peraturan dan logika tertentu. Sebenarnya, gagasan liberalisme muncul di Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Eropa Barat selama abad ke-18 untuk menantang dominasi merkantilisme di lingkaran pemerintah. Adam Smith dan penulis lainnya termasuk David Ricardo, John Maynard Keynes, Milton Friedman, dan Friedrich Hayer adalah ilmuwan yang menentang intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi.

Melawan kebijakan merkantilisme, Adam Smith dalam Eisenbrauns (2007; dalam Widodo, 2017) memandang bahwa manajemen dan intervensi pemerintah atas ekonomi berbahaya dan tidak dapat dipercaya, pendapatnya sebagai berikut: "Negara, harus berusaha mengarahkan para pejabatnya, para SDMnya dengan cara apapun, mereka harus menggunakan kekuasaan Negara untuk memfasilitasi rakyatnya, tidak hanya akan membuat dirinya (Negara dan para pejabatnya) minta perhatian yang paling tidak perlu. Sebuah otoritas Negara seharusnya dapat dipercaya, tidak hanya diserahkan kepada satu orang saja, tapi juga pada sekelompok yang memiliki wewenang yang diduga dapat membahayakan rakyatnya, juga Negara hendaknya bagai seorang ibu yang memiliki kesabaran agar anak-anaknya cukup terlatih dalam menghadapi berbagai jenis persaingan".

Pandangan ini kemudian tercermin dalam asumsi liberalisme yang dikembangkan untuk menantang proposisi merkantilisme. Asumsi dasar liberalisme kembali menurut Eisenbrauns (2007; dalam Widodo, 2017) dalam *There is no need to expound the foundations and principles of modern liberalism, which emphasises the values of freedom* adalah bahwa sifat hubungan ekonomi internasional mendasari harmonisasi, yang sangat kontras dengan merkantilisme, di mana inti dari hubungan ekonomi yang berkompetisi dan bertentangan. Hukumnya adalah kalah dan menang. Dengan gagasan yang berlawanan dengan pendahulunya, Smith berpendapat bahwa dunia kesejahteraan hanya bisa dicapai di bawah kerangka liberalisme di mana hubungan ekonomi internasional adalah "permainan dengan sejumlah pemikiran positif"; Artinya, semua orang akan mendapatkan keuntungan setelah bisnis dioperasikan.

Teori liberalisme menantang kerangka merkantilisme dengan proposisi berikut. Pertama, teori ekonomi liberal berkomitmen pada pasar bebas atau perdagangan bebas. Inilah pernyataan besar Adam Smith dalam tulisannya tentang "Kekayaan Bangsa-Bangsa" bahwa kekayaan suatu bangsa akan lebih baik dilayani oleh kebijakan perdagangan bebas. Smith menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari tingkat pembagian kerja, yang kemudian bergantung pada skala pasar. Smith sangat menentang hambatan seperti substitusi impor dan tarif impor yang ditetapkan oleh merkantilisme yang mencegah pertukaran barang dan pembesaran pasar. Dengan demikian, untuk mencapai kekayaan, negara tidak harus memproduksi barang-barang manufaktur tapi mereka harus fokus pada komoditas primer. Dengan melakukan hal tersebut, negara dapat lebih memanfaatkannya dengan memproduksi barang-barang yang dapat mereka hasilkan dengan biaya yang relatif rendah dan memperdagangkannya untuk komoditas yang memerlukan biaya produksi yang tinggi di rumah.

Seperti yang ditulis Smith: "Apa kehati-hatian dalam perilaku setiap keluarga, bisa jadi kebodohan dalam kerajaan besar. Jika sebuah negara asing dapat memasok dengan komoditas yang lebih murah daripada yang bisa kita hasilkan, lebih baik membelinya dari mereka dengan sebagian hasil produksi industri kita, yang digunakan dengan cara yang kita punya beberapa keuntungan". Oleh karena itu, menurut liberalisme, pemerintah harus mengambil sedikit intervensi dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai efisiensi maksimum; Artinya, pemerintah harus menempuh pendekatan 'laissez-faire, laissez passer' terhadap ekonomi dengan 'tangan tak terlihat' untuk menentukan industri mana yang harus didorong ke depan, dan pemerintah harus memberikan pertahanan nasional yang memadai dan juga pada dasarnya memberlakukan undang-undang.

Penting untuk menyebutkan buku Adam Smith yang paling terkenal yang membahas tentang tangan tak kasat mata. Sebenarnya, tangan tak terlihat adalah metafora yang diperkenalkan Smith dalam buku "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations", terbit tahun 1776. Dalam bukunya, Smith menyatakan bahwa, dalam ekonomi pasar bebas, setiap individu untuk mengejar ketertarikan pada kepentingan pribadinya, dan tindakan orang-orang ini cenderung memperkuat manfaat bagi seluruh masyarakat melalui tangan yang tak terlihat. Dia berpendapat bahwa, setiap individu menginginkan keuntungan terbesar mereka akan memaksimalkan keuntungan seluruh masyarakat, Ini seperti seluruh komunitas dari semua manfaat individu.

Kedua, kaum liberal berasumsi bahwa pasar meningkat secara tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, setelah beroperasi, ia akan bekerja dengan baik dengan logika internal untuk memfasilitasi pertukaran dan meningkatkan ekonomi sosial. Seperti yang dikatakan Adam Smith bahwa umat manusia secara inheren mengetahui bagaimana mengemudikan truk, barter dan pertukaran sehingga pasar dapat meningkat secara alami bahkan tanpa ada intervensi

eksternal atau setidaknya suatu bentuk pemerintahan diperlukan hanya untuk periode sistem pasar primitif.

Ketiga, kaum liberal berpendapat bahwa dalam hubungan kepentingan yang harmonis ada persaingan pasar produsen dan konsumen, yang kemudian berakibat pada pertumbuhan ekonomi dan maksimalisasi efisiensi. Dalam arti tertentu, liberalisme mengasumsikan bahwa pasar dioperasikan dalam masyarakat di mana individu dapat memperoleh informasi yang lengkap dan dengan demikian mereka dapat memilih hal yang paling menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa liberalisme mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan dan kebebasan individu. Dengan demikian, nilai barang dan jasa ditentukan secara individual karena dinamika pasar dan ini menciptakan ekonomi yang fleksibel dimana setiap perubahan harga akan menyebabkan perubahan pola produksi, konsumsi, dan institusi ekonomi. Selain itu, perlu untuk dicatat bahwa di pasar persaingan yang sesungguhnya, posisi tawar yang tidak setara terkadang dapat terjadi berdasarkan persetujuan bersama pihak-pihak dan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Ini adalah hasil alami dari persaingan ekonomi yang pertukaran bersifat sukarela, tidak ada paksaan.

Memang benar bahwa baik merkantilisme maupun liberalisme menyepakati isu bahwa kegiatan ekonomi meningkatkan kekuatan dan keamanan negara. Namun, kedua ideologi tersebut memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pasar ekonomi. Sementara merkantilisme menganggap negara sebagai instrumen penting untuk melakukan dan mengembangkan ekonomi nasional, liberalisme mendukung operasi pasar bebas. Premis dasar liberalisme adalah bahwa hal itu memperhitungkan konsumen individual, rumah tangga, atau perusahaan sebagai elemen masyarakat.

Ketika individu mendapatkan minat maksimal di pasar, mereka pada gilirannya akan berkontribusi pada kekayaan sosial untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan dengan demikian mempromosikan kekuatan dan keamanan negara.

Karena liberalisme sangat menganjurkan peran individual di pasar ekonomi, karena liberalisme mengkritik monopoli dalam perdagangan. Sebagai pandangan negatif Adam Smith mengenai monopoli Perusahaan India Timur yang memerintah dan menekan beberapa orang. Smith tidak hanya mencela perusahaan tersebut sebagai monopoli berlumuran darah, namun juga menuduh perusahaan pembantaian di Bengal. Situasi itu semakin memburuk pada tahun 1770 ketika sebuah kelaparan telah menghancurkan sepertiga populasi Bengal, yang kemudian menekan Perusahaan karena berkurangnya produktivitas lokal, dan akhirnya memaksanya untuk mendapatkan penguatan dari pemerintah Inggris untuk menghindari kebangkrutan.

D. Kekuatan dan Kelemahan

Sementara liberalisme terus mendominasi disiplin ilmu ekonomi, ilmuwan ekonomi memberikan komentar bagus mengenai kekuatan liberalisme yang menyediakan alat analisis dan kerangka kebijakan yang membantu negara mendapatkan beberapa sumber daya langka dengan bertukar tangan dengan negara-negara lain. Selain itu, mekanisme harga (harga alam hasil dari kompetisi bebas) bahwa liberalisme memastikan untuk mendapatkan keuntungan bersama dan dengan demikian menghasilkan efisiensi sosial. Namun, ada juga kritik yang melawan liberalisme ekonomi.

Kritik utama adalah bahwa proposisi dasarnya tentang keberadaan pelaku ekonomi dan persaingan di pasar ekonomi tidak mencerminkan kenyataan. Artinya, sementara kaum liberal menegaskan bahwa liberalisme ekonomi melakukan persamaan dan kebebasan individual, dan pertukaran itu bersifat sukarela. Namun, kenyataannya pertukaran ini jarang gratis dan setara namun atas paksaan yang dipengaruhi oleh faktor politik lain seperti monopoli atau monopsoni. Akibatnya, kaum liberal cenderung mengabaikan dampak faktor nonekonomi pada bursa dan juga dampak pertukaran terhadap politik.

Keterbatasan lain dari liberalisme adalah memisahkan ekonomi dari aspek masyarakat lainnya dan menerima kerangka sosiopolitik yang ada sebagaimana diberikan termasuk distribusi hak kekuasaan dan properti. Agar kata, kaum liberal tidak melihat situasi global namun tetap fokus pada ekonomi dan mencoba memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, beberapa orang berpendapat bahwa analisis ekonomi liberal cenderung statis dalam dinamika ekonomi politik internasional di era kontemporer. Faktanya adalah bahwa perubahan penting dalam ekonomi, teknologi dan politik sangat kuat dan melampaui analisis ekonomi bola dari kerangka liberalism (Widodo, 2017).

BAB 5

KAITAN EKONOMI POLITIK DENGAN MANAJEMEN

A. Pengertian Manajemen

Menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat Anda praktikkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Pengertian ilmu manajemen secara umum wajib Anda pahami agar dapat diimplementasikan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Suryatama (2014), manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kata manajemen berasal dari bahasa perancis kuno, yaitu *management*, yang memiliki arti “ seni melaksanakan dan mengatur.” Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal.

Sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Athoillah (2010), bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen merupakan sesuatu yang mengatur dalam hal proses baik dalam sumber daya manusia maupun sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu organisasi. Siswanto mengemukakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan (Siswanto, 2006). Maka dari itu manajemen merupakan keilmuan dan seni yang mengatur dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian sehingga dalam suatu organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan tercapai segala tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam manajemen diadakannya suatu kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan bersama dalam organisasi

yaitu kegiatan dalam hal merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan serta mengembangkan sumber daya manusia serta sarana prasarana. Semua kegiatan itu harus diikuti dan dikerjakan dengan kerja sama tim yang baik dalam suatu organisasi tersebut sehingga dapat tercapai dengan maksimal tujuan organisasi. Maka dari itu pimpinan dalam suatu organisasi yang mengatur segala sumber daya yang ada, harus memiliki berbagai strategi dan pengembangan motivasi terhadap karyawan atau bawahannya.

B. Ekonomi Politik dan Manajemen

Apabila ditinjau dari definisi masing-masing, kata politik dan bisnis mempunyai makna yang berbeda. Politik berasal dari kata "polis" dalam bahasa Yunani yang berarti negara atau kota. Kemudian berkembang menjadi kata "politikos" atau politics dalam bahasa Inggris yang menggambarkan sesuatu apapun yang berkenaan dengan urusan-urusan negara ataupun kota. Menurut Budiardjo (1982:8), politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Istilah-istilah yang sangat biasa di bidang manajemen pemasaran di perusahaan swasta, seperti "persaingan", "riset pasar", "segmentasi", "positioning", atau "diferensiasi", kini sudah mulai biasa dipakai politisi dan partai politik. Pemasaran politik itu telah banyak digunakan secara sistematis di Indonesia sejak pemilihan umum lebih terbuka dan persaingan sehat mulai terjadi tahun 1999. Konsep manajemen partai politik juga menemukan relevansinya karena lima tahun ke depan isu manajemen partai politik secara modern sudah harus diterapkan partai politik di Indonesia.

Sedangkan definisi dari bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan mencari profit (Griffin, 2007:4). Jadi dapat disimpulkan bahwa objek dari politik adalah negara maka objek dari bisnis adalah perusahaan. Namun dalam banyak hal, politik dan bisnis

seringkali berkaitan atau berhubungan. Kaitan yang pertama, sebagai ilmu (pengetahuan). Apabila bisnis dianggap termasuk ke dalam kajian bidang ilmu ekonomi maka dalam sejarahnya sampai sekarang terdapat bidang ilmu ekonomi politik. Bidang ilmu ini mencoba menggabungkan analisa kebijakan negara untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Meskipun sekarang ilmu politik dan ilmu ekonomi menjadi bidang ilmu tersendiri namun kajian ilmu ekonomi politik tetap masih ada. Kaitan yang kedua, perusahaan sebagai organisasi bisnis memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar organisasi yang disebut lingkungan. Lingkungan luar dibedakan menjadi lingkungan tugas (task environment) dan lingkungan umum (societal environment). Lingkungan tugas yaitu lingkungan yang mempengaruhi organisasi secara langsung seperti pemilik, pemasok, pelanggan (konsumen) dan serikat pekerja. Sedangkan lingkungan umum yaitu lingkungan yang pengaruhnya bersifat tidak langsung terhadap organisasi. Salah satu lingkungan tak langsung (societal environment) yang mempengaruhi organisasi bisnis adalah lingkungan politik.

Mengapa niat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia cenderung menurun? Jawabannya adalah salah satunya berkaitan dengan lingkungan politik dalam arti luas termasuk faktor keamanan dalam negeri yang sering disingkat sebagai Polkam. Mungkin investor asing beranggapan bahwa resiko politik apabila berbisnis di Indonesia masih tinggi.

Kaitan yang ketiga, pelaku politik membutuhkan pelaku bisnis atau sebaliknya. Representasi pelaku politik adalah partai politik. Partai politik adalah organisasi nirlaba namun partai perlu uang atau dana untuk menggerakkan roda organisasinya. Tentu saja kebutuhan dana tersebut diperoleh dari para donatur baik dari anggota (internal) partai maupun dari simpatisan (eksternal) partai. Sebaliknya, para pelaku bisnis juga membutuhkan politikus sebagai pelaku politik dalam menjalankan bisnisnya. Sebagian pelaku politik duduk

atau menjadi anggota Dewan mulai dari tingkat DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.

Pelaku bisnis berharap bahwa Undang-Undang ataupun peraturan dibawahnya yang dibuat Pemerintah bersama anggota Dewan bersifat "kondusif" bagi perusahaannya. Disinilah yang dikenal istilah mulai dari lobi politik sampai dengan cara menyogok. Kaitan yang keempat, politikus (politician) yang juga (asalnya) dari pebisnis (businessman). Hal seperti ini terdapat di banyak negara termasuk Indonesia.

Setelah rezim Orde Baru memimpin negara Republik Indonesia maka banyak pengusaha atau pebisnis yang mendekati kepada rezim Orde baru. Cara yang paling mudah adalah dengan cara menjadi anggota Golkar sebagai mesin politik rezim Orde Baru. Dengan menjadi anggota Partai Politik diharapkan bisnisnya akan "aman" dan sukses dan jika beruntung, jabatan politik seperti Menteri juga dapat dicapai. Hal itu pernah dirasakan oleh Bob Hasan, raja kayu Indonesia yang diangkat oleh mantan Presiden Soeharto menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada kabinet Soeharto tahun 1998 yang hanya dijabat 2 bulan (Maret 1998 - Mei 1998) karena Soeharto keburu lengser pada bulan Mei 1998.

Dalam prakteknya, suatu disiplin ilmu tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus terkait dengan disiplin ilmu lainnya. Ilmu politik juga terkait dengan banyak disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, ilmu hukum, filsafat, ilmu ekonomi, ilmu bisnis dan lain-lain. Dalam tulisan ini sudah dijelaskan bagaimana keterkaitan antara ilmu politik dan ilmu bisnis sebagai ilmu sendiri ataupun bagian dari ilmu ekonomi dalam penerapannya pada suatu negara. Isu-isu ekonomi bisa menjadi isu politik atau sebaliknya. Pertemuan APEC yang notabene adalah forum ekonomi beberapa kali memasukkan isu terorisme dalam agenda pembicaraan.

Dalam kampanye calon Presiden, isu ekonomi dianggap menjadi isu yang paling penting dalam kampanye politik karena rakyat mengharapkan pemimpin yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Seorang politikus

PDIP sebelum Pilpres mengatakan bahwa sulit bagi pesaing SBY untuk mengalahkannya karena kebijakan ekonomi SBY langsung dirasakan rakyat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), penurunan harga BBM, sekolah gratis dan kredit usaha mandiri. Dan nyatanya itu memang yang menjadi isu utama SBY pada saat kampanye meskipun Pilpres ada di ranah politik. Bagi pebisnis sendiri, stabilitas politik sangat penting mengingat investasi yang ditanamkan dalam jumlah yang (sangat) besar. Stabilitas politik dapat menjamin stabilitas ekonomi demikian pula sebaliknya stabilitas ekonomi akan meningkatkan stabilitas politik karena rakyat yang semakin makmur akan berkurang keinginannya untuk berbuat hal-hal yang anarkis.

C. Peran Negara dalam dalam Ekonomi Politik

Ilmu politik dan ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat. Di Indonesia, pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai (koalisi). Kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikan wewenang/power kepada dia dalam memengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat.

Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara/wilayah. Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu bersifat terbatas sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya yang dimaksud, meliputi alam (hutan, tanah, air dan lain-lain), SDM, dan modal. Beberapa literatur memasukan teknologi dan kemampuan entrepreneurship/kewirausahaan sebagai sumber daya.

Di sini terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat itu power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa (politik). Dengan menggunakan

sumber daya yang ada di suatu negara, pemimpin yang mempunyai power berhak menentukan jenis barang dan jasa apa yang diproduksi (misalnya fokus pada industri atau jasa) dan bagaimana metode yang digunakan dalam memproduksi barang/jasa itu diproduksi (padat karya vs padat modal).

Lebih lanjut, pemegang kekuasaan juga dapat menentukan di mana dan kapan barang dan jasa diproduksi, dan didistribusikan. Penentuan impor terhadap komoditas strategis juga ditentukan oleh pemegang kekuasaan. Berdasarkan uraian itu terlihat bahwa kekuatan politik memengaruhi bagaimana sistem ekonomi di suatu negara bekerja. Misalnya, ekonomi liberal, dipimpin atau campuran. Jika ekonomi liberal, alokasi sumber daya akan ditentukan kekuatan pasar. Sebaliknya, pada sistem ekonomi dipimpin, alokasi sumber daya ditentukan pemerintah. Namun, pada kasus yang lain, justru kekuatan ekonomi bisa memengaruhi kekuatan politik di suatu negara. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan besar atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan ekonomi dapat melakukan lobi-lobi politik sehingga dapat mempengaruhi situasi politik, kelembagaan, dan hukum di negara itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (1992). Ekonomi ketiga dan teori pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Adam Smith (1776). "An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations" dalam Mark Skusen (2005); Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern, Jakarta Prenada.
- Athoillah, Anton, (2010). Dasar-Dasar Manajemen, Bandung: Pusataka Setia.
- Budiarjo, Miriam.1993. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Griffin, Ricky W. dan Ronald J. Ebert, (2007), Bisnis (diterjemahkan oleh Sita Wardhani), Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hollander, E.P. (1985). "Leadership and Power." Dalam G. Lindzey dan E.Aronson (eds.)
- Lane, Jan- Erik et.al. (1994). Ekonomi Politik Komparatif, terjemahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lipsey, Richard G. (1981). Economics. Ninth edition. Harper and Row,
- Martin Staniland. (2003). Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Kelatarbelakangan. terjemahan. Jakarta: Rajawali.
- Rachbini, Didick J. (2002). Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Samuelson. Paul & William D Nordhaus (1990). Mikroekonomi Jilid II. Jakarta : Erlangga.

Sastradipoera, Komaruddin. (2001). Sejarah Pemikiran Ekonomi. Kappa-Sigma. Bandung.

Siswanto, (2006). Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Suryatama, Erwin, (2014). Aplikasi Iso Sebagai Standar Mutu, Jakarta: Kata Pena.

Widodo, Erna S. (2017). Ideologi Utama Dalam Ekonomi Politik Global Antara Merkantilisme Dan Liberalisme. Majalah Manajemen Dan Bisnis Ganesha, Volume 1, Nomor 1, April 2017.

TENTANG PENULIS



Elmon Tampubolon, S.Pd., M.M. lahir di Sitonggi-tonggi, 31 Januari 1971. Menyelesaikan Pendidikan SD Negeri Lumbanjulu , SMP Swasta Bunga Bangsa Medan, SMA Swasta Medan Area dan S1 di STKIP ALBANA Program Studi Administrasi Perkantora Lulus Thn 2003, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISM lulus pada Tahun 2018 dengan gelar Magister Manajemen . Di tahun 1996 menikah dengan Almarhum Dermawati Siagian (+) Di Karuniai Satu orang Anak Perempuan dan di Thn 1999 menikah kembali dengan *Hotmida Br. Silitonga.*, dikaruniai 1 Anak perempuan , 3 anak laki - laki dan mempunyai cucu 3 orang dari anak pertama 2 cucu laki-laki dan 1 cucu perempuan.

Mengawali karier sebagai Dosen sejak tahun 2016 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Medan dan mengajar di beberapa Perguruan Tinggi dengan mata kuliah, Ekonomi Internasional, Perilaku Konsumen , Perilaku keorganisasian dan operasi Riset.

Sampai sekarang Aktif sebagai Dosen Tetap Yayasan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia - Medan dan mengajar dengan mata kuliah : Ekonomi Internasional , Perilaku konsumen , Perilaku keorganisasian dan Operasi Riset.



Suria Alamsyah Putra, SE., MM Lahir di Binjai, 25 November 1985. Lulus Sarjana Manajemen di STIE Pelita Bangsa Binjai tahun 2012, pada Tahun 2012 Juga saya Menikahi seorang gadis yang bernama Linggayani Sinulingga, S.Pd, setelah menikah kami dikaruniai 2 Anak Laki - laki yang pertama lahir pada tahun 2013 yang bernama Eza Raditya Alamsyah dan anak laki - laki kedua saya lahir pada tahun 2020 yang bernama Rafa Ravindra Alamsyah, pada tahun 2012 saya melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE - ISM) Konsentrasi Manajemen Sumberdaya Manusia tahun 2014. Aktif sebagai dosen sejak tahun 2015 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa dengan mata kuliah, Ekonomi Koperasi, Manajemen Resiko & Asuransi, Komunikasi Bisnis, Pengantar Akuntansi I, Ekonomi Koperasi. Sampai Sekarang Aktif Mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Medan dengan mata kuliah : Pengantar Ekonomi Mikro, Manajemen Strategi, Teori Pengambilan Keputusan, Manajemen Operasional II, Perekonomian Indonesia, Manajemen Sumberdaya Manusia I. Selain mengajar, saya juga aktif di sebagai Editorial di Jurnal Ekonomi LLDIKTI Wilayah I dan Jurnal Ekonomi dan Syariah JESYA (STIE Alwashliyah Sibolga), Tim Redaksi di Jurnal Manajemen dan Akutansi Medan (STIE Indonesia-Medan)



Hendrik Pantas, S.Sos, M.Sc; Lahir di Kisaran Kabupaten Asahan, 12 Pebruari 1963. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri No 69 di Kota Medan lulus tahun 1974, SMP Negeri I Kota Medan lulus tahun 1977, SMA Negeri I Kota Medan lulus tahun 1982. Tahun 1983 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tenaga administrasi. Tahun 1993, menikah dengan Helvina Sibuea dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki.

Tahun 2005, menyelesaikan Sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darma agung pada, dan menyelesaikan program Magister/S2 pada Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada tanggal 29 Oktober 2008

Medio Juli Tahun 2019, beralih tugas dari PNS administrasi menjadi PNS Dosen pada LL Dikti Wilayah I, dan diperbantukan pada Universitas Quality di Medan. Mengajar di beberapa perguruan tinggi dengan mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Ekonomi Politik dan Sosiologi Politik. Sampai sekarang aktif sebagai dosen tetap LL Dikti Wilayah I, diperbantukan pada Universitas Quality di Kota Medan

EKONOMI POLITIK (DALAM PRESPEKTIF MANAJEMEN)

(DALAM PRESPEKTIF MANAJEMEN)

Entrepreneurship, Vol. 1, No. 1, 2011
Journal of Management and Business Administration, Vol. 1, No. 1, 2011
Journal of Business Administration, Vol. 1, No. 1, 2011
Journal of Business Administration, Vol. 1, No. 1, 2011

